

# MEDIA KALTIMTARA

RABU,  
1 NOVEMBER  
2023

.COM

PASANG IKLAN  
HUBUNGI:  
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



## MANTAN WAKIL WALI KOTA TARAKAN KEMBALI MASUK BUI

BACA HALAMAN 2



DIDUGA API BERMUNCULAN  
DARI KAMAR, PICU SEISI  
RUMAH TERBAKAR

BACA HALAMAN 8

# Mantan Wakil Wali Kota Tarakan Kembali Masuk Bui

**TARAKAN** - Mantan Wakil Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat kembali mendekam di Lapas Kelas IIA Tarakan usai dijemput pihak Kejaksaan Negeri Tarakan, Senin (30/10/2023) sekira pukul 10.00 Wita.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Adam Saimima melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tarakan, Harismand mengatakan kendala dari eksekusi Khaeruddin lantaran lamanya menunggu salinan putusan MA diterima Kejari.

Kejari Tarakan, kata dia, sudah empat kali mengirimkan surat permohonan salinan putusan kasasi ke Mahkamah Agung, namun balasan salinan putusan tersebut baru keluar pada Senin (30/10). Kemudian pada pukul 10.00 Wita, Kejari langsung menjemput Khaeruddin Arief di kediamannya Jalan Rawasari.

Khaeruddin sebelumnya dinyatakan kalah dalam kasasi yang diajukan pihak Kejaksaan Negeri Tarakan di tingkat MA. Kemudian Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan tertuang dalam surat putusan Nomor 5849 K/Pid.Sus/2022.

"Beliau kami eksekusi saat beliau berada di rumah dan kami membawa Pak Khaeruddin ke Lapas Tarakan dalam rangka melaksanakan putusan MA tersebut," terangnya.

Dia melanjutkan, penolakan sebenarnya tidak ada lanjutannya. Namun adanya permintaan surat salinan, pihak Khaeruddin menginginkan Kejaksaan Negeri Tarakan menyerahkan ke pihaknya.

"Jadi tadi diserahkan surat salinan, dia kooperatif saja, oke dan langsung dibawa ke Lapas Tarakan kami eksekusi langsung ke Lapas langsung pakai rompi," paparnya.

Dalam putusan Nomor 5849 K/Pid.



Mantan Wakil Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat saat digiring ke Lapas Kelas IIA Tarakan.

Sus/2022, MA telah memeriksa perkara tindak korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Tarakan.

Dan perkaranya diputuskan Khaeruddin Arief Hidayat yang beralamat di Jalan Rawasari Kelurahan Karang Harapan ini, diputus oleh Mahkamah Agung (MA) menerimakasasi yang diajukan JPU Kejaksaan Negeri Tarakan.

Sebelumnya terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak 2 Februari 2022 sampai 30 Mei 2022. Kemudian terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Samarinda dan didakwa dengan dakwaan subsidaritas primair.

Yakni perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Putusan MA lanjutnya mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi dalam hal ini penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda nomor 7/Pid-TPK/2022/PT SMR tanggal 30 Mei 2022 yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMmr tanggal 30 Maret 2022.

Diketahui sebelumnya, Khaeruddin Arief terseret perkara mark up lahan Kelurahan Karang Rejoketika menjabat sebagai mantan Wakil Wali Kota Tarakan. Dalam kasus ini, ada dua terpidana lainnya yakni Hariono dan Sudarto. Sudarto sudah lebih dulu kooperatif menyerahkan diri setelah petikan kasasi MA diterima jaksa. Sementara untuk Hariono belum juga dieksekusi karena masih menunggu salinan putusan yang bersangkutan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia  
Editor: Andhika



# Dukung Penuh Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

**TANJUNG REDEB** - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengapresiasi pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan serta ekonomi kreatif.

Dia menilai, dengan adanya kegiatan tersebut ada keinginan untuk memajukan pariwisata Berau. Terlebih dengan adanya perjanjian dengan beberapa OPD terkait bahkan dengan jasa perbankan serta Forkopimda Berau.

Apalagi dengan APBD Berau yang besar tahun ini yang mencapai Rp 5,1 triliun. Disayangkan jika pemanfaatannya justru tidak tepat sasaran. Dirinya berharap program-program yang ada bisa membawa perubahan. Baik itu melalui ekonomi kerakyatan, UMKM hingga pariwisata.

Diakuinya keunggulan wisata di Berau sangat liar biasa keasliannya. Yang tidak dimiliki daerah lain bahkan semua ada di Berau.

Makanya dirinya berharap, kepada pemerintah pusat baik melalui Kemenkominfo maupun Kemenparekraf untuk memperhatikan Kabupaten Berau sebagai penyangga IKN ke depan, terutama pada sektor pariwisata. "Tolong Berau dimonitor jangan di kota-kota besar saja," ungkapnya.

Sehebat apapun konsep wisata yang dibuat akan percuma jika harga tiket pesawat mahal. Wisatawan tentunya akan lebih memilih ke daerah yang lebih murah. Bahkan jika dibanding harga di Berau, orang akan memilih pergi ke luar negeri seperti, Filipina, Thailand atau Singapura.

Sedangkan, Kaltim sebagai penghasil pendapatan terbesar di Indonesia sudah seharusnya melihat orang-orang yang berkompetensi untuk menata Berau.

"Jangan hanya potensi Kaltim yang dihabiskan. Tapi untuk pengembangan pariwisata sebagai persiapan nanti setelah pertambangan habis malah tidak ada," jelasnya.

Seharusnya juga mulai saat ini pemerintah daerah sudah mempersiapkan ekowisata ini sebagai pengganti pendapatan asli daerah. Serta membantu Berau menjadi penyangga IKN ke depan. Yang membutuhkan konsep dan program yang benar-benar jelas.

"Seorang Gubernur Kaltim Isran Noor saat awal menjabat pernah memberikan kucuran anggaran untuk Berau mencapai Rp 300 miliar. Bahkan di akhir masa jabatannya untuk peningkatan akses jalan ke pesisir sebanyak Rp 500 miliar," terangnya.

Diharapkan ke depan dengan adanya pembangunan akses jalan tersebut bisa membawa perubahan dan men-

datangkan banyak wisatawan untuk berkunjung ke Berau. Tentunya itu menjadi tupoksi pariwisata, pihaknya sebagai wakil rakyat akan mendukung dan mengesahkan anggaran jika memang digunakan untuk kemajuan Bumi Batiwakkal.

"Salah satu yang bisa dilakukan yakni peningkatan SDM. Misalnya pelatihan guide atau menyiapkan peta wisata di bandara," paparnya.

"Bisa juga membuka lapangan pekerjaan, misal nanti di Derawan atau Maratua dibuka UPTD DLHK di sana. Atau bisa juga menyiapkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)," urainya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

# Sorot Pelayanan Air Bersih yang Belum Optimal

**TANJUNG REDEB** – Pelayanan air bersih yang belum optimal di Kabupaten Berau, menurut Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai, belum sesuai dengan realisasi usulan saat Musrenbang kecamatan. Padahal itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dirinya mengingatkan Pemkab Berau agar lebih teliti dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mendorong Pemkab Berau untuk menangani pendistribusian air bersih di Kampung Tubaan, Kecamatan Tabalar yang hingga saat ini belum terealisasi.

“Saya juga mendengar tentang minimnya pelayanan air bersih ini tidak hanya di Kampung Tubaan saja, tapi daerah kecamatan terdekat dari kota juga masih banyak yang belum merasakan pelayanan air bersih,” tuturnya.

Dirinya menyayangkan, daerah



Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai

setingkat kecamatan tidak memiliki pasokan air bersih. Terlebih, hal ini terus di suarakan di dalam Musrenbang kecamatan setiap tahunnya. Hanya saja, sampai saat ini belum ada realisasinya.

“Setiap Musrenbang masyarakat telah menyuarakan permintaan pelayanan air bersih bisa ada di daerahnya. Seharusnya ini bisa tertangani,” ungkapnya.

Rifai menyebut, dengan anggaran APBD Kabupaten Berau yang menurutnya cukup besar ini, seharusnya bisa mengakomodir salah satu kebutuhan pokok, yakni air. “Anggaran kita ini cukup besar, ini semestinya mudah untuk dipenuhi,” katanya.

Dirinya meminta Pemkab Berau bisa memilah agar benar-benar bisa memprioritaskan usulan atas aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan. Kata dia, barulah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Selanjutnya tinggal selaraskan dengan hasil reses dewan. Tidak hanya pelayanan air bersih tapi kebutuhan penting lain masyarakat kita,” tandasnya. (adv/and)

# Pengurus Ramai Mengundurkan Diri, Nilai sebagai Permasalahan Internal KONI

**TANJUNG REDEB** - Belum lama ini, sejumlah pengurus KONI Berau memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, hal itu sebagai permasalahan dalam internal KONI Berau.

Saat diminta tanggapan, Sakirman mengaku belum bisa banyak berpendapat. Adapun beberapa aturan yang termaktub dalam AD/ART KONI atau memang mengharuskan untuk keluar.

“Semisal mereka terjun ke politik, itu kan mewajibkan pengurus KONI untuk keluar. Tetapi adanya permasalahan pengunduran diri ramai-ramai ini saya anggap bagian dari dinamika di setiap organisasi,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, mengenai permasalahan itu, pihaknya di Komisi III DPRD Berau belum ada rencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tetapi akan melakukan rapat internal dahulu.

“Kalau butuh mediasi, pastinya kami di Komisi III siap memberi ruang lewat RDP. Tetapi soal ini masih



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

belum terlalu darurat, karena kami anggap masih internal mereka. Saya harap bisa diselesaikan di internal dulu,” katanya.

Lanjutnya, perjalanan KONI sejak Musyawarah Provinsi (Musprov) hingga pelantikan memang tidak sedikit dinamika yang telah terjadi. Dia berharap dengan kondisi saat ini ada hikmah dibalik itu semua. Besar harapan KONI Berau dapat segera pulih dan berbenah. Mengingat KONI merupakan bagian dari pembinaan atas prestasi olahraga di Kabupaten Berau.

“Dengan pengurus baru nantinya ada komunikasi dan konsolidasi yang lebih baik dengan para atlet. Dan semua cabor yang ada 40 jumlahnya bisa diajak kembali,” harapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar persoalan tersebut jangan terbengkalai terlalu lama. Dia meminta KONI untuk segera mengisi kekosongan pengurus yang ada. Pun komunikasi dengan pemerintah provinsi dapat terjalin dengan baik untuk menyampaikan kondisi rumah tangga mereka seperti apa. “Yang penting para atlet kita tetap semangat dan tidak pantang menyerah,” tandasnya. (adv/and)

## Minta Infrastruktur Jalan di Talisayan Diperhatikan Serius

**TANJUNG REDEB** – Selama 10 tahun terakhir, beberapa ruas jalan yang ada di Kecamatan Talisayan belum tersentuh pengaspalan. Hal itu disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

Dia mengatakan, seharusnya sudah ada penganggaran untuk beberapa ruas jalan di Talisayan. Terlebih sudah beberapa kali diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Sekitar 10 tahun tanpa pengaspalan. Sudah saya usulkan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati, termasuk masyarakat menyampaikannya. Agar pengaspalan itu segera dilakukan,” ungkapnya.

Subroto membeberkan bahwa ada beberapa titik ruas jalan yang belum sama sekali mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bukan hanya pengaspalan, tetapi juga belum dibangun dengan baik.

“Tapi syukurlah usulan kami mendapat respons dari Bupati dan Wakil Bupati, bahwa pada tahun 2024 mendatang akan dilakukan pengaspalan di Talisayan,” terangnya.

Rencana pengaspalan itu, diharapkan Subroto dapat terealisasi. Mengingat APBD Berau cukup besar. Anggaran itu tentu dapat digunakan juga untuk pembangunan jalan yang hampir 10 tahun seakan tidak masuk dalam prioritas.

“APBD Berau sangat besar. Pengaspalan itu penting mengingat sangat mendukung akses wisatawan menuju daerah wisata yang ada di pesisir selatan,” tutupnya. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

## Harap Kepala Kampung Terpilih Berdedikasi Tinggi untuk Masyarakat



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah

**TANJUNG REDEB** – Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serentak di Kabupaten Berau resmi berakhir pada 24 Oktober lalu. Saat ini telah terpilih kepala kampung yang baru di 53 kampung.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah berharap, terpilihnya kepala kampung yang baru dapat melahirkan kepala kampung yang memiliki inovasi untuk memajukan kampung dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan juga dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Pun terus belajar menyesuaikan sistem pemerintahan kampung mulai dari alurnya mengambil kebijakan, kemudian bagaimana profesional untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat kampung.

“Termasuk memiliki inovasi baru untuk kemajuan masyarakat kampung masing-masing,” ungkapnya.

Terlebih harus mampu bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau sebagai instansi teknis yang menangani. Pun harus bisa mensejahterakan warganya.

Utamanya kepala kampung yang baru terpilih tahun ini. Berbeda dengan kepala kampung incumbent atau yang telah memegang suatu jabatan pasti memiliki pengalaman dalam birokrasi dan menjalankan tugasnya. Paling tidak, kata Dia, ada orientasi awal juga yang diberikan dari DPMK Berau bagi mereka.

“Sehingga harapan saya punya inovasi yang baik untuk kemajuan kampung dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (adv/and)



Bupati Bulungan Syarwani saat memberikan arahan kepada para kepala desa, terkait pentingnya program TAKE Di Bulungan.

## Anggaran Bertambah, Program TAKE Ditingkatkan

**TANJUNG SELOR-** Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan, salah satu dari 15 program prioritas pemerintah daerah, yaitu Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE) Bulungan Hijau.

Hingga memasuki bulan Oktober 2023, sisa anggaran tersebut mencapai sekitar 2 miliar. Anggaran TAKE tersebut dialokasikan bagi 74 Desa yang ada di Bulungan. Transfer anggaran dari kabupaten ke desa tersebut dipastikan tidak mengurangi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada.

"Evaluasi kita sampai hari ini untuk program TAKE tahun 2023, sudah teresap sekitar 50 persen dari alokasi anggaran Rp 4 miliar," ungkap Bupati Bulungan, Syarwani.

Anggaran tersebut terbagi ke-34 desa dari 74 desa yang ada di Bulungan. "Artinya masih ada Rp 2 miliar, anggaran yang tersisa," ungkapnya.

Syarwani memastikan, TAKE tidak membebani dan tidak ada kewajiban untuk mengalokasikan program

TAKE ke dalam ADD maupun Dana Desa (DD). Sehingga, anggaran TAKE dialokasikan tersendiri oleh Pemkab dan tidak mengurangi jatah dari ADD maupun DD.

Diterangkan Syarwani, sebenarnya tinggal bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan tata kelola kawasan, tata kelola lingkungan hijau bagi setiap desa yang ada.

Dia berharap, melalui kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan oleh setiap Desa di Bulungan bisa menjadi agenda forum evaluasi terhadap pelaksanaan TAKE.

Program ini, lanjut Syarwani merupakan salah satu program prioritas serta menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah. Bahkan untuk program TAKE Bulungan Hijau tahun depan ditambah anggaran mencapai Rp 5 miliar. Dijelaskan Syarwani tidak semua daerah di Kaltara yang memiliki komitmen seperti TAKE, jika ada, aloka-

si anggarannya tidak dibebankan ke ADD maupun DD.

"Program TAKE tahun 2024, silakan para kepala desa berkompetisi. Rebut alokasi Rp 5 miliar ini dengan cara kompetitif," jelasnya.

Diingatkan Syarwani, keberhasilan pembangunan di desa tidak sekadar perbaikan kantor desa, semenisasi, gapura, pagar pemukiman dan sebagainya. Tapi juga pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan seperti tempat pembuangan air, tempat penampungan sementara, ketersediaan bak sampah dan sebagainya yang akan membuat desa menjadi bersih, asri serta terkelola dengan baik.

"Ini merupakan komitmen saya sebagai kepala daerah, ketika meluncurkan program ini. Salah satunya, tidak mengganggu alokasi dana desa yang menjadi kewenangan Desa," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto saat diminta komentar oleh sejumlah awak media.

# APBD Perubahan Dievaluasi

**TANJUNG SELOR** - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tengah dilakukan evaluasi.

Proses evaluasi itu, dilaksanakan melalui Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pelaksanaan evaluasi APBD Perubahan, memerlukan waktu selama 14 hari kerja terhitung sejak awal Oktober 2023.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto mengungkapkan melalui APBD Perubahan sebelumnya, ada satu item yang memang menjadi evaluasi. Berdasarkan surat edaran dari Kemendagri, bahwa alokasi anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikururkan sebesar 40 persen, lewat APBD murni.

“Otomatis kami melakukan rapat

bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melaporkan kepada Gubernur Kaltara. Kami melaporkan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita harus memenuhi 40 persen alokasi itu, dan ini yang harus kami atur strategi lagi, ada kebijakan anggaran dan termasuk pengalihan belanja dan sebagainya,” ungkap Denny Harianto, kepada media ini, Selasa (31/10/2023).

Ada beberapa alokasi belanja daerah yang dialihkan, hanya saja dirinya enggan merinciikan. Tapi, pada prinsipnya, tidak menganggu belanja dari setiap OPD.

Evaluasi APBD Perubahan Pemrov Kaltara, terhitung sejak awal Oktober 2023, mestinya saat ini telah rampung, hanya saja proses di Kementerian ada beberapa tahap yang dilewati berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memang ini memerlukan waktu cukup panjang.

“Tapi, kita usahakan bangun komunikasi, mudah-mudahan awal November sudah bisa kita laksanakan,” tuturnya.

Karena, hasil evaluasi dari Kementerian akan dilakukan perbaikan untuk disempurnakan. Baru nanti dikeluarkan nomor register. “Nomor Registrasi itu, kita jadikan sebagai dasar untuk menurunkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD,” tukasnya.

Sedangkan, untuk realisasi APBD Perubahan saat ini, mengingat ada tambahan anggaran secara otomatis realisasi ikut berkurang.

“Terakhir, kita itu diangka 54,59 persen. Saat ini terus bergerak, karena ada pengerjaan besaran yang telah dilakukan seperti belanja modal termasuk sebagian fisik,” tutupnya.

(tin/and)

Editor: Andhika



Tiga unit rumah terbakar, diduga api bermunculan dari kamar hingga merembet ke meteran listrik.

# Diduga Api Bermunculan dari Kamar, Picu Seisi Rumah Terbakar

TANJUNG SELOR - Warga Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Dihebohkan dengan adanya kebakaran rumah, tepatnya di gang Usat Unyao, belakang perumahan BPS Bulungan.

Ada sekitar 3 unit rumah warga ludes terbakar. Kejadian itu terjadi pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 16.00 wita. Fredman salah satu korban rumahnya ikut terbakar akui, bahwa kebakaran berasal dari meteran listrik rumahnya.

"Begitu saya keluar rumah, melihat ada sumber api yang keluar lewat meteran listrik. Saya coba padamkan, dengan kain basah. Di meteran listrik, api sempat padam, tetapi begitu saya masuk ke kamar, ternyata api di dalam kamar sudah membesar," ujarnya.

Dia terasa panik, dan sekeluarga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Barang yang tersisa hanya baju di badan. "Ap-

inya cepat membesar, hingga saya kewalahan untuk memadamkan," tukasnya.

Saat kejadian, dia bersama keluarga istri dan anaknya. Mereka berlarian keluar rumah sembari berteriak kebakaran. Beberapa warga yang menyaksikan sempat coba memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya.

Namun, kobaran api makin besar ditambah dengan panas terik dan angin, api sudah tidak bisa diredam, hingga tiga unit rumah tetangga ikut terbakar. "Saat kejadian saya bersama anak, istri dan mertua saya," jelasnya.

Dirinya tidak sempat menyelamatkan dokumen dan barang penting lainnya. "Surat-surat penting dan dua unit kendaraan sepeda motor tidak sempat diselamatkan," ungkapnya.

Dirinya bersama keluarga, sudah bertempat tinggal di Gang Usat Unyao sejak tahun 2016 silam. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bakal

terkena musibah seperti ini. "Saya tetap bersyukur karena keluarga selamat semua, dari ancaman petaka inj," ucapnya dengan nada lirih.

Media ini berupaya untuk mengkonfirmasi ke PMK Bulungan, perihal kebakaran dan penanganan pihaknya. Namun, yang bersangkutan enggan untuk berkomentar hingga berita ini ditayangkan.

Sementara itu, Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha melalui Kasi Humas, Bripta Hadi Poernomo, menerangkan kepolisian tengah ikut membantu kebakaran di lokasi. Pihaknya belum bisa memberikan keterangan karena laporan dari lapangan belum masuk. "Laporan belum masuk mas," singkatnya.

Pantauan media ini di lapangan, api berhasil di padamkan sekitar pukul 17.40 wita. Dengan mengerahkan beberapa unit mobil PMK, Bulungan. (tin/and)

Editor: Andhika



**PENINJAUAN:** Sekda Bulungan Risdianto, S.Pi, M.Si didampingi kepala DLH, Disparpora, camat dan juga lurah Tanjung palas meninjau kawasan wisata Gunung Putih untuk dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan Kabupaten Bulungan.

## Gunung Putih Memungkinkan Dipasang Via Ferrata dan Flying Fox, Jadikan Gunung Putih Kawasan Wisata Terintegrasi

TANJUNG SELOR – Dalam upaya mengoptimalkan kembali potensi pariwisata di kawasan Gunung Putih yang berada di kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto, S.Pi, M.Si didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), camat dan juga kelurahan setempat.

Melakukan peninjauan beberapa titik di kawasan gunung putih yang nantinya dilakukan pemetaan dan perencanaan pengembangan kawasan wisata ini menjadi lebih menarik untuk dikunjungi.

Dalam kesempatan tersebut, Risdianto mengatakan desawisata Gunung Putih kedepan perlu dikembangkan lebih serius agar menarik pengunjung. Salah satunya dengan melihat kondisi gunung dengan tebing kars (gamping) vertikal yang curam, me-

mungkinkan dilakukan pemasangan via ferrata atau tangga besi yang ditanam di dinding tebing, yang nantinya digunakan untuk mendaki puncak gunung bagi pecinta adrenaline.

“Ini masih awal untuk kami lakukan pemetaan, selain penataan kembali jalan pendakian. Rencana pemasangan via ferrata, hingga pemasangan flying fox jika memungkinkan,” ungkapnya, Selasa (31/10/2023).

Selain itu puncak gunung putih perlahan juga dilakukan pembenahan agar nantinya menjadi spot foto yang menarik, karena dari puncak gunung batu ini bisa dilihat suasana Tanjung Selor dari atas.

Menurut Sekda Bulungan yang terpenting kawasan Gunung Putih nantinya bisa dikembangkan secara terintegrasi tentunya dengan wisata lain yang ada di Kabupaten Bulungan.

“Kita berharap nantinya, obyek wisata ini juga dimanfaatkan oleh

berbagai komunitas yang menggelar kegiatan disini, yang tentunya banyak memberi dampak positif. Selain dari sektor pendapatan asli daerah maupun tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan terutama UMKM nantinya,” terangnya.

Langkah awal yang akan dilakukan, kata mantan Kepala Bappeda Litbang Kaltara tersebut adalah dengan melibatkan tenaga ahli yang dimiliki untuk mendapat rekomendasi pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi Gunung Putih sebelum dimulai pengembangan.

Kawasan Gunung Putih sesuai surat keputusan bupati, mencakup lahan seluas 200 hektar, yang didalamnya terdapat beberapa gunung batu karst meliputi, Gunung Putih, Wincung, Wayang, Imang, sampai Gunung Kerubung menjadi satu kesatuan landscape yang ada. (dsh)



Kopi Jantan yang masih ditemui di beberapa lokasi di Tarakan.

## BPOM Ingatkan Masyarakat Bahaya Konsumsi Kopi Jantan

TARAKAN - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Tarakan mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi kopi jantan. Hal ini karena kopi jantan mengandung zat kimia yang dapat merusak kesehatan terlebih jika dikonsumsi secara berlebihan.

Pengawas Farmasi Makanan (PFM) Ahli Madya Balai POM Tarakan, Christine Natalia Panjaitan mengungkapkan,

hasil penelitian Balai POM mendapatkan kopi jantan mengandung sildenafil. Jika rutin mengonsumsi produk pangan atau obat mengandung sildenafil akan berbahaya bagi kesehatan terutama bagi jantung.

"Sildenafil merupakan bahan kimia yang terkandung dalam kopi jantan. Ini sangat berbahaya bagi jantung," ucapnya di Tarakan, Selasa (31/10/2023).

Ia mengatakan kopi jantan yang ditemui di Kaltara berasal dari Tawau Malaysia. Guna mencegah maraknya masyarakat mengonsumsi kopi jantan, Balai POM telah melakukan operasi pembersihan atau razia ke beberapa lokasi penjualan pada Ju-

mat (27/10/2023) lalu.

"Tidak hanya sekali dan ke depan akan melakukan razia lagi. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukannya," katanya.

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlah produk yang diamankan Balai POM saat melakukan razia. "Untuk jumlah, nanti kami akan beritahu saat konpers bersama teman teman media," paparnya.

Christine menjelaskan dalam upaya penindakan, Balai POM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Yakni memberi teguran, sanksi administrasi, hingga melakukan pemusnahan. "Tapi kalau ada indikasi pelaku usaha sengaja akan dibawa ke pengadilan," tegasnya.

Mencegah maraknya barang berbahaya tersebut, Balai POM menghimbau masyarakat untuk menajadi konsumen yang cerdas. Caranya dengan melakukan Cek KLIK yakni Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa. "Kami juga menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan hal tersebut guna menghindari dari efek negatif," katanya.

Selain itu, juga dengan meman-

faatkan BPOM Mobile. Dijelaskannya, BPOM Mobile adalah aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari BPOM, mengecek suatu produk dengan memindai kode QR atau kode batang, serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk.

"Jadi semua manfaat itu didapatkan melalui BPOM Mobile. Jadi aplikasi ini penting," ucapnya.

Kata Christine, BPOM telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan anggota DPR komisi 9. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang obat, kosmetik dan makanan utamanya tentang bahaya dan risiko konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

"Tahun ini sudah lakukan sosialisasi ke 15 ribu masyarakat di 30 titik di Kaltara. Mulai dari Tarakan, Bulungan, kabupaten Malinau dan di Nunukan hingga ke Bunyu, Bulungan," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika



ADE/MKR

Suasana penanaman 1000 mangrove.

## Peduli Lingkungan, BPOM Tarakan Tanam 1000 Mangrove di Area Ponpes Hidayatulloh

**TARAKAN** - Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) melakukan penanaman 1000 pohon mangrove di area Pondok Pesantren Hidayatulloh tepatnya Jalan Kuburan Cina, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (31/10/2023). Kegiatan penanaman mangrove tersebut dilakukan oleh BPOM secara serentak di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan Net Zero Carbon.

Pengawas Farmasi Makanan (PFM) Ahli Madya Balai POM Tarakan mengatakan, area Pondok Pesantren Hidayatulloh dipilih sebagai tempat lokasi penanaman mangrove karena merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Terlebih di lokasi tersebut rawan mengalami abrasi.

BPOM Net Zero Carbon program melalui penanaman mangrove ini direncanakan akan dilakukan selama tiga tahun. "Kegiatan ini dilakukan selama tiga tahun, mulai dari 2023,

hingga 2025," katanya.

Ke depan BPOM akan berdiskusi dengan DLH untuk menentukan lokasi penanaman mangrove berikutnya. Untuk bibit pohon mangrove hari ini, kata Crisini, berasal dari Kota Tarakan dan Berau, Kalimantan Timur. "Bibit 800 dari Berau sementara 200 nya dari Tarakan," paparnya.

Kegiatan ini merupakan kerjasama BPOM, DLH serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pertamina dan pabrik udang Mustika. Dijelaskannya, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dalam rangka mengatasi lingkungan yang rusak.

Kemudian mendorong percepatan implementasi tanggung jawab dan kepedulian lingkungan dari industri obat dan makanan. Selanjutnya meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Dan Mendukung percepatan konservasi mangrove di garis pantai Indonesia.

Menurutnya, kegiatan ini memberi manfaat yakni sebagai bentuk perlindungan abrasi dan resiko bencana alam, pengendalian pencemaran air dan polusi udara serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian potensi bahan baku alam dari keanekaragaman hayati di hutan mangrove dan keseimbangan ekosistem laut.

Sementara itu Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemkot Tarakan, Jamaluddin yang ikut dalam kegiatan ini mengatakan, penanaman mangrove hari ini, bertujuan menjadikan Tarakan kota yang maju dan sejahtera selaras dengan visi melalui Smart City. "Salah satunya ada environment atau lingkungan yang baik dan untuk mencapainya maka alam harus dijaga dan salah satunya menanam mangrove," katanya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

Lebih Dekat dengan Satu Klik



## KEJARI BALIKPAPAN SELIDIKI DUGAAN KORUPSI DI KPU KOTA MINYAK

BACA HALAMAN 2-3



**BAWASLU BONTANG  
MULAI TERTIBKAN  
BALIHO PARTAI SEBELUM  
PENGUMUMAN DCT  
BACA HALAMAN 36**



Kantor KPU Kota Balikpapan.

# Kejari Balikpapan Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Kota Minyak

**BALIKPAPAN** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Balikpapan saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dalam proyek pengadaan catering.

Kasi Intel Kejari Kota Balikpapan, Ali Mustofa mengatakan, bahwa kasus ini bukan pengemban dari hasil penanganan yang dilakukan oleh

Polresta Balikpapan.

Pihak kejaksaan lebih kepada penyelidikan dugaan korupsi, sedangkan pihak kepolisian terkait dugaan kasus pidana penggelapan.

“Memang saat ini Polres sedang menangani tindak pidananya, tapi kami dari Kejaksaan juga fokus untuk menangani dugaan tindakan korupsi terkait anggaran proses menge-

luarkan uangnya,” ujarnya Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut Ali menjelaskan, dugaan korupsi tersebut terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada di lingkungan KPU Kota Balikpapan. Termasuk menyangkut proses pengeluaran anggaran di Sekretariat KPU Kota Balikpapan.

“Untuk penyelidikan kasus ini su-

dah ada 7 orang saksi dari pihak KPU Kota Balikpapan yang diminta keterangan," jelasnya.

Dijelaskan Ali Mustofa, kasus ini bermula masalah tunggakan pembayaran catering senilai Rp 157 juta. KPU Kota Balikpapan dilaporkan menunggak pembayaran catering sejak Desember 2022 hingga Februari 2023.

Dari keterangan pihak penyedia, yakni CV CBM yang mengaku memang belum mendapatkan pembayaran sama sekali dari KPU Kota Balikpapan. Tetapi dari pihak KPU Balikpapan menyatakan, bahwa sudah membayarkan kepada pihak ketiga atas nama Ahmad Zubaidi. Berdasarkan keterangan dari pimpinan CV CBM bahwa nama

Ahmad Zubaidi tersebut tidak ada dalam struktur.

Saat ini, Ahmad Zubaidi telah ditetapkan tersangka oleh Polresta Balikpapan dan telah ditahan di Rutan Balikpapan atas dugaan kasus penggelapan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

**radar.**  
MEDIA  
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com  
www.radarkukar.com | www.samarinda.com  
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0853 4894 3982

TOYOTA LET'S GO BEYOND

satu Indonesia

**BOOKING THS SAJA**  
**BTS**  
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan  
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo  
**BTSOLI**

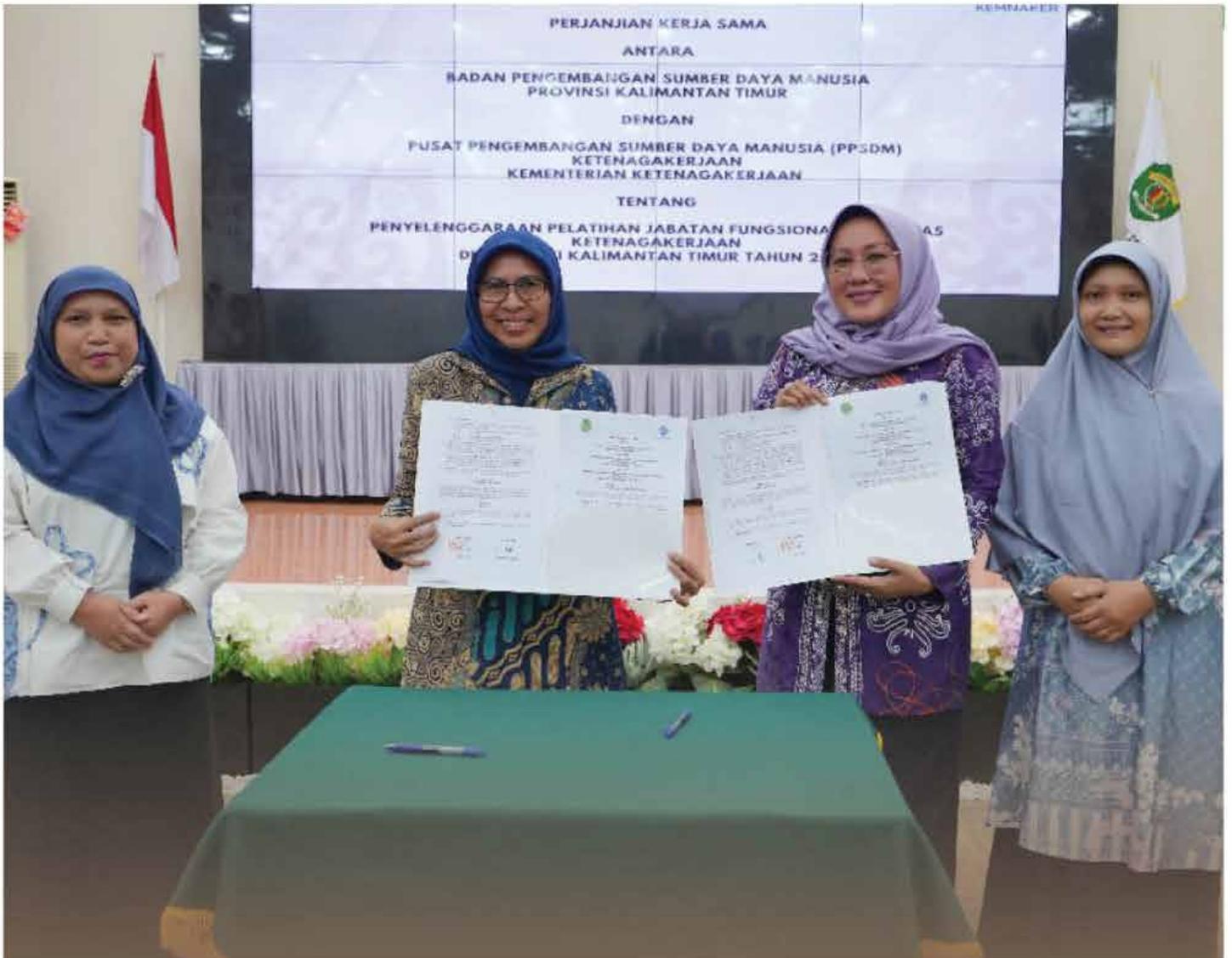
\*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang



**BPSDM KALTIM & PPSDM KETENAGAKERJAAN KEMENAKER RI**

# JALIN KERJASAMA PENINGKATAN SDM



Kedua dari Kiri, Kepala PPSDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P., dan Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.A.P., melakukan Tanda Tangan Kerja Sama

## BPSDM KALTIM DAN PPSDM KETENAGAKERJAAN KEMENAKER RI JALIN KERJASAMA UNTUK PENINGKATAN SDM

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Penandatanganan kerjasama berlangsung di gedung aula utama BPSDM Kaltim, Jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, pada Sabtu (27/10/2023).

Kepala PPSDM Ketenagakerjaan Kemenaker RI, Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P., mengapresiasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PPSDM Ketenagakerjaan ini.

"Saya mengapresiasi kerjasama yang baik ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Saya berharap kedepannya

akan semakin banyak kerja sama dan kolaborasi semacam ini untuk meningkatkan kompetensi ASN Ketenagakerjaan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Helmiaty juga menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya peran sumber daya manusia dalam aktivitas lembaga atau organisasi, karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik.

"PPSDM Ketenagakerjaan Kemnaker RI adalah kawah candra dimuka sebagai pencetak aparatur yang profesional di bidang ketenagakerjaan," katanya.

Saat ini PPSDM Ketenagakerjaan tengah bertransformasi menjadi Kemnaker Corporate University (Corpu), Kemnaker Corpu sendiri merupakan alat strategis kementerian untuk mencetak SDM Aparatur Ketenagakerjaan yang kompeten, profesional, dan

berkarakter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kerjasama bidang ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu langkah strategis Kemnaker Corpu. Termasuk di antaranya kerjasama dengan BPSDM pemerintah provinsi Kaltim, dimana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang terpilih, khususnya pejabat fungsional pengawasan," ungkapnya.

Terakhir, Helmiaty mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah ditandatangani pada hari itu dan berharap, kerjasama ini akan terus dijalankan sebagai langkah mencetak sumber daya manusia yang unggul.

"Kepada Ibu Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya dalam penyelenggaraan pelatihan ini," tutupnya **(ADV/Han/BPSDM)**

**Pewarta: Hanafi**  
**Editor: Agus S**



Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra Nina Dewi M AP saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara

## BPSDM Kaltim Gelar Evaluasi Pasca Latsar CPNS di Paser

**PASER** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim melalui Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) menggelar Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kyriad Hotel Sadurangas, Paser, Kamis (19/10/23)

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPSDM Provinsi Kaltim dengan Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser. Dalam acara ini juga turut menghadirkan 3 Pemateri yaitu Analis Pengembangan kompetensi Ahli Muda, Dimas Radhitya Anggara, Widyaiswara Ahli Madya, M. Denny Syahroni dan Widyaiswara Ahli Muda, Yoyok Setyo Langgeng.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan kegiatan ini guna mengetahui perkembangan alum-

ni pelatihan pasca mengikuti pelatihan dan sebagai pemenuhan data dan Informasi tentang implementasi atau penerapan pelatihan yang telah dilaksanakan.

"Evaluasi pasca diklat adalah salah satu fungsi dalam tahapan kontrol dalam suatu proses manajemen penyelenggaraan diklat dan evaluasi pasca pelatihan. Ini suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelaksanaan secara obyektif, reliable dan sah atau valid yang dilakukan setelah selesai proses pelatihan," ungkapnya.

Nina Dewi berharap melalui kegiatan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat.

"Untuk para peserta diharapkan belajar dengan sebaik-baiknya dalam pelatihan ini. Semoga dari pelatihan ini para peserta tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat," tutupnya. **(ADV)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Dari Kiri : Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dan Para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten PPU

## DPMPTSP PPU & BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN PRIMA

**PENAJAM** - Demi terwujudnya kualitas pelayanan prima di tingkat kabupaten Penajam Paser Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Kabupaten PPU.

Dengan konsep pelatihan pelayanan prima atau sertifikasi petugas layanan, acara ini diadakan oleh DPMPTSP PPU dan BPSDM Kaltim di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Sabtu (21/10/2023)

Nampak hadir pada pembukaan acara, PJ Bupati PPU, Sekretaris Daerah PPU, Asisten 3 PPU, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi

Kalimantan Timur (Kaltim) Nina Dewi, Narasumber Dari Widyaiswara

BPSDM Kaltim Hernawaty, Kepala Inspektorat Daerah PPU, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU.

Adapula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DisKOMINFO) PPU, Kepala Bidang Pengembangan Teknis BPSDM Provinsi Kaltim, dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas DP-MPTSP PPU.

PJ Bupati PPU, Makmur Marbun menyambut baik kegiatan ini. Dia mengatakan kehadiran para peserta di pelatihan tersebut bukan hanya

sekadar berkumpul, namun juga sebagai bentuk komitmen Pemkab untuk memberikan pelayanan prima yang terbaik guna memajukan daerah, terutama Kabupaten PPU.

"Pada kesempatan yang baik ini, ijin saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih DPMPTSP PPU yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi di lingkup DPMPTSP PPU," paparnya.

Di samping itu, saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta pelatihan yang telah hadir di ruangan ini.

"Semoga dengan kegiatan ini menjadi titik awal dalam meningkatkan pelayanan prima di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama dalam penguasaan di bidang Perizinan dan Non-Perizinan serta mendorong Investor untuk Investasi di Kabupaten PPU," tutupnya.

(ADV)

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan tema pelatihan pelayanan prima Sabtu (21/10/2023) di PPU.

## Semangat Reformasi Birokrasi, BPSDM Kaltim Optimis Ciptakan Pelayanan Prima, Efisien, dan Responsif kepada Masyarakat

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten penajam Paser Utara (PPU) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan tema pelatihan pelayanan prima untuk para Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah kabupaten PPU pada Sabtu (21/10/2023).

"Pelatihan ini menjadi bukti nyata komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat," ujar Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik adalah salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, peran setiap individu dan lembaga yang terlibat dalam pelayanan

publik sangatlah penting.

"Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kita dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," serunya.

Selain mendalami pengetahuan teknis, lanjut Nina, dalam pelatihan ini juga akan membahas nilai-nilai seperti integritas, etika, dan empati dalam pelayanan publik.

"Ini adalah aspek yang tak kalah penting karena mereka menciptakan kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat," katanya.

Nina berharap, setiap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bertanya, dan berdiskusi aktif agar dapat mengambil pelajaran yang berharga serta berbagi pengalaman, pengetahuan dan wawasan dengan narasumber.

"Saya ucapkan terima kasih kepada DPMPSTP Kab. PPU yang telah berkenan bersinergi da-

lam pelaksanaan kegiatan ini. Tak lupa pula saya, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berupaya keras untuk dapat mewujudkan kegiatan ini. Tidak lupa terima kasih kepada narasumber pada pelatihan kali ini yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukan yang padat, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar," ucapnya.

Nina yakin, Permen PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 akan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing.

"Dengan semangat reformasi birokrasi, hari ini kita berkumpul untuk mengambil langkah lebih maju dalam upaya kita memberikan pelayanan yang prima, efisien, dan responsif kepada masyarakat," pungkasnya. **(ADV)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



**SHARING SESSION**

Selasa/24 Oktober 2023  
Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN

**Sambutan**  
Dra. Nina Dewi, M.AP  
Kepala, BPSDM Provinsi Kaltim

**Narasumber**  
Dr. Muhammad Taufiq, DEA  
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

**Moderator**  
Dr. H. Bere Ali, M.Si  
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kaltim

10.00 - 12.00 WITA  
09.00 - 11.00 WIB  
11.00 - 13.00 WIT

ID : 838 110 7674  
Pass : bpsdm

BPSDM KALTIM

Terbuka Untuk Umum | Gratis e- Sertifikat  
<https://bit.ly/shkbpsdmkaltim>

## BPSDM KALTIM GELAR SHARING SESSION TERKAIT MANAJEMEN ASN DAN HONORER DALAM REVISI UU ASN

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali akan menggelar Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" pada Selasa (23/10/2023) besok pukul 10.00 - 12.00 Wita.

Menurut informasi yang didapat Mediakaltim.com, acara Sharing Session ke-44 ini akan diselenggarakan secara online atau daring dan bisa diakses melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube milik BPSDM Kaltim.

"Mari bergabung dalam pembahasan menarik dan interaktif di Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan tema: "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN";" bunyi tulisan yang disebarakan oleh pihak humas BPSDM Kaltim.

Narasumber yang akan dihadirkan dalam Sharing Session ini adalah Dr. Muhammad Taufiq, DEA selaku Deputi Bidang Kebijakan

Pengembangan Kompetensi ASN (LAN RI).

Acara juga akan dibuka langsung oleh Dra. Nina Dewi, M.AP selaku Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, acara langsung di Moderatori oleh Dr. H. Bere Ali, M.Si dari Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Para peserta yang mendaftar atau registrasi melalui link ini <https://bit.ly/shkbpsdmkaltim> akan mendapatkan Gratis E-Sertifikat

Berikut link zoom Sharing Session ke-44.

ID Zoom : 838 110 7674

Passeord Zoom : bpsdm

You Tube : BPSDM KALTIM

BPSDM Kaltim

is inviting you to a scheduled Join Zoom Meeting :

<https://us02web.zoom.us/j/8381107674?pwd=KzRxZHBYSUxVMlFVYVgxZXk1WEdnQT09>.

**(ADV)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan pada sharing Session ke-44 dari tayangan YouTube.

## KEPALA BPSDM: INI 7 POIN PENTING DALAM UU ASN TERBARU

**SAMARINDA** - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP menyebutkan Revisi Undang-Undang ASN telah resmi disahkan oleh pemerintah sejak tanggal 3 Oktober 2023. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara sharing Session ke-44 BPSDM Kaltim secara daring pada Selasa (24/10/2023).

Dia juga mengatakan terdapat 7 hal yang dituangkan dalam UU ini. Antara lain, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya

kerja dan citra institusi.

"Revisi ini sebagai upaya mempercepat pelaksanaan transformasi manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Secara umum perlu menjadi perhatian bersama agar tidak perlu berlama-lama karena maksimal 6 bulan sudah harus dibentuk peraturan pelaksana" ujarnya.

Dijelaskan, perubahan-perubahan tersebut di satu sisi disambut positif sebagai payung hukum bagi manajemen ASN dan honorer. Namun di satu sisi juga bisa menimbulkan polemik jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat dan kemampuan fiskal pemerintah.

"Oleh karenanya, sosialisasi mengenai Revisi UU ASN harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan Revisi UU ASN di

lapangan," harapnya.

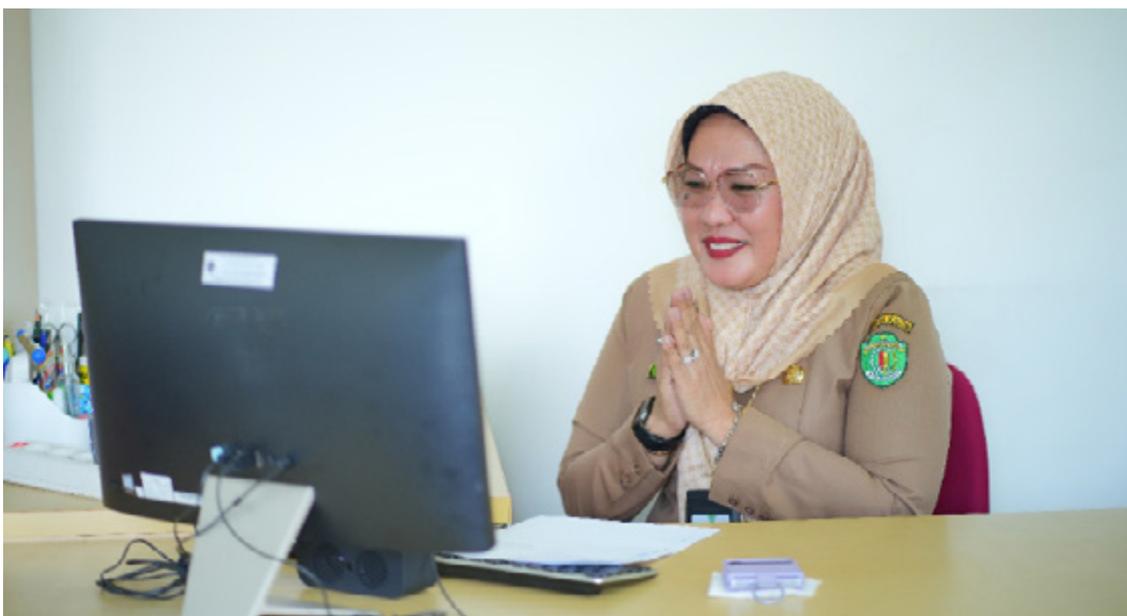
BPSDM Kaltim optimis untuk terus meningkatkan kualitas pengetahuan baik ASN dan masyarakat umum melalui berbagai metode salah satunya Sharing Session.

Pasal-pasal krusial dalam Revisi UU ASN, antara lain :

1. Larangan bagi instansi pemerintah merekrut tenaga honorer semenjak Revisi UU ASN dan penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024.
2. Kesetaraan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
3. TNI-POLRI bisa mengisi jabatan tertentu di ASN;
4. Pemberhentian tidak hormat ASN yang menjadi anggota partai politik. **(ADV/Han/BPSDM)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" secara daring.

## BPSDM KALTIM SOSIALISASIKAN UU ASN TERBARU

**SAMARINDA** - Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Aparat Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait esensi dari Undang Undang (UU) ASN terbaru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, gelar Sharing Session ke-44 dengan tema "Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU ASN" yang diselenggarakan secara online melalui media sosial yakni aplikasi Zoom Meeting dan Aplikasi YouTube.

Sharing Session ke-44 dimulai pukul 10.00 Wita. Setiap peserta yang menyaksikan akan diberikan sertifikat oleh BPSDM Kaltim secara online atau berupa E-Sertifikat.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim Nina

Dewi, dari ruangan studio kantor BPSDM Kaltim.

Tercatat pada awal dibuka, kegiatan ini diikuti 222 peserta dan berkembang hingga akhir acara menjadi 490 peserta. Peserta bukan hanya dari ASN yang berada di Kaltim tapi juga yang berada di luar Kaltim.

Nina Dewi pun bersyukur atas terselenggaranya Sharing Session untuk kesekian kalinya ini, dan berkomitmen akan terus mengupayakan agar Sharing Session BPSDM Kaltim akan terus dilakukan agar mampu mencetak ASN yang berkualitas.

"Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas ridho dan rahmatNya pada hari ini kita dapat berkumpul secara Virtual di acara Sharing Session dengan Tema

Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN," katanya.

Menurutnya, sosialisasi mengenai UU ASN terbaru ini harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan UU ASN di lapangan.

"Bapak/ Ibu hadirin yang kami Hormati, Kami tetap Optimis Untuk Terus meningkatkan Kualitas Pengetahuan baik ASN dan Masyarakat umum melalui berbagai metode salah satunya Sharing Session ini. Besar harapan kami, agar Bapak/ Ibu para peserta dapat menyerap materi dengan sebaik baiknya," pintanya. **(ADV/Han/BPSDM)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Staf Administrasi penerimaan, Susanti saat berada di Kantin Kejujuran Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

## ADA KANTIN KEJUJURAN DI BPSDM KALTIM

**SAMARINDA** - Setiap tahun ribuan orang mengikuti pelatihan di kampus "Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami" nama lain dari tempat pelatihan BPSDM Kaltim. Para peserta yang mengikuti pelatihan di sini, banyak yang datang dari luar kota Samarinda yang jaraknya bisa sampai 6 jam atau lebih dari ibu kota Kalimantan Timur itu.

Tak jarang para peserta harus tinggal di gedung asrama yang telah disediakan oleh BPSDM Kaltim. Karena harus mengikuti pelatihan secara classical atau tatap muka di sana untuk beberapa hari.

Tentunya bagi peserta yang tinggal di asrama pasti memerlukan banyak kebutuhan dan keinginan berbelanja. Namun lokasi mini market sangat jauh. Kondisi ini membuat BPSDM Kaltim berinisiatif membangun sebuah kantin yang sekalian melatih mental kejujuran para peserta dan para pekerja di BPSDM Kaltim.

Namanya Kantin Kejujuran Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

Nama yang disematkan sengaja mirip dengan tempat keberadaannya di tempat pelatihan BPSDM Kaltim. Kantin ini buka 24 jam dan tidak dijaga. Kantin ini dikelola langsung oleh BPSDM Kaltim.

Staf Administrasi Penerimaan, Susanti, menyebutkan kantin kejujuran ini adalah ide dari Widyawara Ahli Utama BPSDM Kaltim Muclis Syahrani.

Kantin kejujuran ini menyediakan makanan, minuman dan perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi dan sampo yang biasa dijual di mini market. Setiap barang jualannya sudah tertulis harganya di etalase dan lemari pendingin.

"Di sini ada mie instan, ada kopi instan. Jika mau air panas kami sediakan dispenser buat air panas, dan minuman dingin di showcase. Jika pembeli ingin bayar, di atas etalase disediakan kotak untuk memasukkan uang bayar," ujarnya.

Alasan dibukanya kantin kejujuran agar memudahkan para peserta jika ingin berbel-

anja makanan atau minuman, dan tidak harus mencari atau berbelanja keluar komplek perkantoran.

"Iya karena mini market kan jauh, jadi kita sediakan di sini. Lagipula di sini jugakan ada taman buat nongkrong, dan kantin ini diperuntukan buat pekerja di sini dan peserta yang sedang mengikuti pelatihan," ungkapnya.

Tidak merinci besaran pendapatan, Susanti menyebutkan setiap pendapatan selalu diputar kembali untuk dibelikan barang yang ingin dijual kembali di kantin kejujuran.

"Hasilnya kita putarkan kembali untuk beli barang untuk dijual kembali di Kantin Kejujuran," tutupnya.

Untuk diketahui, Kantin Kejujuran ini lokasinya di dalam komplek perkantoran BPSDM Kaltim, tepatnya di samping ruang kelas pelatihan dan di samping taman yang berada di tengah-tengah komplek pelatihan BPSDM Kaltim. **(ADV/Han/BPSDM)**

**Pewarta : Hanaf**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Bidang PKMF BPSDM Prov. Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP, M.M. saat memberikan sambutan panitia.

## BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

**SAMARINDA** - Peningkatan kualitas pengawas tenaga kerja sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar pelatihan khusus untuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Pembukaan pelatihan digelar pada Selasa (24/10/2023) di Aula Gedung Utama BPSDM Kaltim, Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda.

Hadir dalam acara, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti, perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Widyaswara BPSDM Kaltim dan para peserta pelatihan.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti mengatakan pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan dari tanggal 24 - 28 Oktober 2023. Narasumber yang dihadirkan dari widyaswara BPSDM

Kaltim dan Disnakertrans Kaltim, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Kita telah membuka pelatihan bagi ASN Jabung pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim. Jumlah peserta atau pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti kegiatan ini adalah 31 orang," paparnya.

Rina berharap kepada para peserta mampu menjadi pengawas yang profesional dan mampu menjadi mediator bagi tenaga kerja dan pihak perusahaan.

"Semoga setelah pelatihan ini para peserta mampu menjadi mediator dalam menyikapi hubungan industrial yang ada di Kaltim," tutupnya.

Para peserta akan melakukan pelatihan secara classical atau tatap muka di Komplek pelatihan BPSDM Kaltim atau biasa disebut kampus "Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami" selama 5 hari ke depan dan setiap peserta yang lulus akan diberikan sertifikat. **(ADV/BPSDM/Han)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



## Penjaringan Berinovasi 2023: SI CALO KEBUN Disbun Kaltim Bersaing di 10 Besar

**SAMARINDA** - Inovasi Sistem Informasi Calon Petani/Pekebun dan Calon Lahan Perkebunan, atau SI CALO KEBUN, yang dimiliki Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim), masuk dalam nominasi 10 besar Penjaringan Perangkat Daerah Berinovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2023, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim.

Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa tim penilai Balitbangda Kaltim telah melakukan penjaringan terhadap inovasi yang dikembangkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam proses penjaringan ini, Muzakkir mengungkapkan bahwa telah dipilih 10 OPD yang akan diusulkan sebagai nominasi Perangkat Daerah Berinovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2023. "Alhamdulillah, melalui inovasi SI CALO KEBUN, Dinas Perkebunan masuk sebagai salah satu nominasi," ungkapnya di Samarinda, Senin (30/10) siang.

Muzakkir menambahkan bahwa OPD yang telah ditetapkan sebagai nominasi sepuluh besar akan mengikuti wawancara di Aula Balitbangda Kaltim pada Senin hingga Selasa (30-31 Oktober 2023) untuk menentukan posisi peringkat 10 besar terbaik.

Selain Disbun Kaltim, ada juga Perangkat Daerah lainnya yang masuk dalam 10 besar nominasi, seperti Badan Pendapatan Daerah dengan inovasi Sadelpost (Samsat Delivery Pos), Geber RT (Gerakan Bersama Rukun Tetangga), E-Wapu

PBBKB (Elektronik Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), E-Pap (Elektronik Pajak Air Permukaan), Biro Organisasi dengan inovasi E-Sakip.

Selain itu, RSUD dr. Kanujoso Dja-tiwibowo Balikpapan masuk dalam 10 besar nominasi melalui inovasi Embah Suka Baper (Eco Enzyme, Mengubah Sampah Organik Rumah Sakit Menjadi Bahan Pembersih), RSJD Atma Husada dengan inovasi Sihati (Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi), Balitbangda dengan inovasi Sentra KI, dan Dinas Sosial melalui inovasi Kelas Budiman (Keterampilan Lansia Budidaya Ikan dan Tanaman).

Muzakkir menjelaskan bahwa SI

CALO KEBUN merupakan inovasi yang diinisiasi pada aksi perubahan PIM IV (PKA) milik Arif Sabtamiharja, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan Perluasan Areal pada tahun 2021.

Inovasi ini, lanjut Muzakkir, dirancang untuk mempermudah layanan pengajuan proposal permohonan bantuan bibit unggul perkebunan bagi kelompok tani yang membutuhkan dengan mengakses <https://cpclkebun.kaltimprov.go.id>.

"Inovasi ini secara tidak langsung mendukung reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan, yakni menciptakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan perluasan tanaman perkebunan," tutup Muzakkir. (adv)





## Disbun Kaltim Targetkan Capai 90 IKM pada Semester Akhir 2023

**SAMARINDA** - Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan nilai 90 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semester akhir 2023. Hal itu diungkapkan Sekretaris Disbun, Surono kepada mediakaltim, Selasa (31/10/2023). Target tersebut naik dari capaian mereka pada semester pertama 2023 yakni 86,13 IKM.

Surono menjelaskan dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, itu sejalan dengan tugas ASN yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik. "Jadi fungsi ASN itu ada tiga. Selain memberikan pelayanan publik, juga sebagai pelaksana kebijakan dan pemersatu bangsa," kata Surono.

Sekretaris Disbun itu menjelaskan ada sembilan indikator penilaian publik menurut Kemenpan RB. Sembilan indikator itu adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan terakhir penanganan pengaduan, saran dan masukan.

"Indikator penilaian kami itu berdasarkan Permenpan RB no 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat," jelas Surono.

Surono juga menjelaskan, cara pengambilan penilaian indikator pelayanan publik dilakukan dengan dua cara. Yakni online dan offline. Pada cara online, Disbun menyebarkan kuisioner kepada masyarakat di daerah-daerah yang mendapatkan pelayanan dari Disbun melalui online.

Setelah itu, ada juga pengambilan kuisioner melalui offline. "Jadi saat kami melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, usai kegiatan kami membagikan kuisioner untuk mereka isi," urainya.

Untuk itu, Disbun Kaltim yakin, tingkat kepuasan publik dapat meningkat hingga 90 IKM. "Kami selalu melakukan perbaikan di sektor pelayanan. Untuk itu, kami optimis tingkat kepercayaan publik terhadap kami meningkatkan," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Disbun Kaltim

menggelar Bimbingan Teknis kepuasan publik kepada pegawai mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam bimtek, pegawai Disbun diberikan arahan cara melayani masyarakat dengan baik serta menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Disbun. (ADV)



Sekretaris Disbun, Surono



## Harga TBS Kelapa Sawit di Kaltim Naik Signifikan pada Oktober 2023

SAMARINDA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Prov Kaltim) mengeluarkan surat keputusan penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun yang bermitra di Kaltim periode II (16 hingga 31 Oktober 2023), Selasa (31/10).

Dalam pembahasan penetapan harga TBS, juga dihadiri oleh Direktorat PPHP Ditjenbun Kementan RI, guna memantau proses penetapannya, dan akan melakukan pemantauan penerapannya pada pekebun yang sudah bermitra.

Dalam kesempatan ini, Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakkir, meminta agar seluruh komponen pekebun bersama-sama melakukan pengawasan penerapan harga di lapangan untuk TBS pekebun yang bermitra. "Laporkan ke Disbun, akan kita tindak sesuai ketentuan," tegasnya.

Dalam keputusan tersebut, TBS kelapa sawit di Provinsi Kaltim periode 16-31 Oktober 2023 mengala-

mi kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit, dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 tahun sebesar Rp2.174,53 per kilogram.

Di mana pada periode sebelumnya, 1-15 Oktober 2023, harga TBS kelapa sawit di Kaltim untuk umur 10 tahun ditetapkan dengan harga Rp2.156,75 per kilogram. Artinya, dalam periode 16-31 Oktober 2023, jumlah kenaikan untuk kelompok umur 10 tahun ke atas mencapai Rp17,78.

Adapun rincian harga TBS bagi pekebun yang telah bermitra dengan pabrik sawit periode 16-31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. TBS yang dipanen dari pohon umur 3 tahun dengan harga Rp1.917,85 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp1.902,09.
2. TBS yang dipanen dari pohon umur 4 tahun dengan harga Rp2.049,33 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang se-

besar Rp2.032,39.

3. TBS yang dipanen dari pohon umur 5 tahun dengan harga Rp2.058,14 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.041,21.
4. TBS yang dipanen dari pohon umur 6 tahun naik menjadi Rp2.079,43 dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.062,35.
5. TBS yang dipanen dari pohon umur 7 tahun dengan harga Rp2.091,39 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.074,23.
6. TBS yang dipanen dari pohon umur 8 tahun sebesar Rp2.107,53 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.090,23.
7. Sedangkan TBS yang dipanen dari pohon umur 9 tahun dengan harga Rp2.149,04 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.131,47. (ADV)



## Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Harga Kernel

Rp. 10.532,27

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim disbun.kaltimprov.go.id

**KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA**



**DINAS PERKEBUNAN**  
Provinsi Kalimantan Timur

**BerAKHLAK**

### INFORMASI HARGA INDIKASI KARET

Tanggal 24 Oktober 2023

	KONDISI KARET Harga jalan Fabrikasi K3 100%	Harga / kg Rp. 18.000 - Rp. 19.000
<b>01</b> Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)	HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEBIH K3 70%-75%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
	HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 60%-69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
	HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPB K3 60%-64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
<b>02</b> Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesia Rubber (SIR20)	HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI/UPPB K3 55%-59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
	HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50%-54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
<b>03</b> Harga SICOM hari ini : 145,4 US Cent Kurs Rupiah Kisaran : Rp. 15.863 Harga Dasar / FOB : Rp. 23.064 X 85% Rp. 19.604	HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 45%-49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
	HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 40%-44% (BARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.900



**DINAS PERKEBUNAN**  
Provinsi Kalimantan Timur



Sistem Informasi Pasar  
Produk Perkebunan Unggul

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	
KARET	Rp. 8.800/kg k3 50-50%	Rp. 12.000/kg	Indikasi Karet K3 100% Rp. 21.642/kg
LADA PUTIH	Rp. 55.000/kg	Rp. 97.000/kg	Indikasi Karet K3 85% Rp. 18.396/kg
KELAPA TUA	Rp. 5.700/bj	Rp. 7.200/bj	Indikasi Karet K3 50% Rp. 9.200/kg
KELAPA MUDA	Rp. 8.700/bj	Rp. 9.500/bj	
BIJI KAKAO	Rp. 28.000/kg	Rp. 32.00/kg	
GULA MERAH AREN	Rp. 28.800/kg	Rp. 30.200/kg	

\*Harga rata-rata komoditi perkebunan Kabupaten/Kota

TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Perkebunan Bermitra Periode II (16-31 Oktober) Bulan September 2023 Berdasarkan Umur Tanaman

Harga TBS Umur > 10 Thn Rp. 2.174,53/kg

Harga TBS Umur < 10 Thn Rp. 1.917,85/kg

Minggu Ke III bulan Oktober 2023

# Cath Lab Sudah Tersedia di RSUD Taman Husada Bontang

**BONTANG** - Cath Lab adalah suatu pelayanan yang dilakukan di laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang Cath Lab pun sudah ada di RSUD Taman Husada Bontang.

Cath Lab atau kateterisasi jantung dan angiografi ini adalah prosedur yang memanfaatkan sinar-X untuk menampilkan gambaran pembuluh darah di berbagai organ tubuh.

Tri Ratna Paramita, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik menjelaskan pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk memeriksa sumbatan, penyempitan, atau pelebaran pembuluh darah dan jantung. "Jika dikatakan, baru RSUD Bontang yang memiliki alat medis Cath Lab ini," ungkapnya pada Senin (30/10/2023).

Alat yang digunakan dalam Cath Lab bisa menghasilkan gambaran pembuluh darah secara detail. Pada



akhirnya, ini bisa membantu dokter secara akurat dalam tindakan operasi atau Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA). "Untuk alat medis kami akan berusaha untuk memenuhinya, akan tetapi, jika dilihat lagi dengan secara rinci masih saja ada beberapa yang kurang," paparnya.

Ratna menambahkan, dengan harapan RSUD Bontang agar dapat

terus melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang.

Maka dari itu, menentukan skala prioritas harus diputuskan bersama dan didahulukan mana alat medis yang benar-benar sangat penting dan lebih urgent. **(dwi/adv)**

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



**SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN**  
\* TOYOTA MOTOR OIL

**Khusus Taxi Online & Travel**

**GUARANTEE PILING HEMAT GUARANTEE**

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang



# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From <sup>Rp</sup>15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni AB

## Dispora Kukar Gelar Pelatihan Kewirausahaan untuk Penyandang Disabilitas

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan kepeduliannya kepada kawan-kawan disabilitas. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, yakni menggelar pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM).

Pelatihan dilakukan selama tiga hari, dengan fokus pemuda dan pemudi disabilitas asal Kukar. Yakni melakukan pelatihan membuat buket seserahan pernikahan. Selain itu juga membuat anyaman kain yang juga untuk seserahan pernikahan.

"Harapan kami ini bisa jadi usaha baru kawan-kawan disabilitas," ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni AB.

Ini bukan menjadi kali pertama klinik WPM melakukan pelatihan yang melibatkan teman-teman disabilitas. Tahun 2022 dan 2023, Dispora Kukar melibatkan 30 pemuda disabilitas tiap tahunnya. Tidak menutup kemungkinan, tahun-tahun selanjutnya akan digelar pelatihan serupa. Dengan harapan ada kesempatan untuk bersaing. "Sehingga mereka punya pengelolaan kewirausahaan yang baik," lanjut Aji Ali.

Kedepannya, Dispora Kukar akan

melakukan pendampingan manajemen kewirausahaannya. Agar kawan-kawan disabilitas yang mengikuti pelatihan, bisa mengelola usahanya dengan baik. Terlebih mampu membuat brand usahanya sendiri. Membesarkan dan meningkatkan pendapatan mereka.

"Pendampingan selama ini mereka dari tahun kemarin terus didampingi, datang ke tempat usaha mereka, saling sharing kita bantu penyediaan alat pendukung usahanya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

# Pemkab Kukar kembali Buka Program 1 Desa 1 Hafidz Quran

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali membuka program 1 Desa 1 Hafidz, dengan menyasar pemuda asal Kutai Kartanegara (Kukar). Pendaftaran sendiri dibuka sejak 30 Oktober-1 Desember 2023. Hal ini dipastikan dan dijelaskan oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza.

“Jadi program 1 Desa 1 Hafidz tahun 2021 sampai 2022 itu masih difasilitasi Yayasan Al Anshar, untuk tahun 2023 ini difasilitasi LPTQ (Kukar),” ujar Dendy, Selasa (31/10/2023).

Dikatakan Dendy, ini menjadi tahun keempat, Pemkab Kukar melaksanakan program ini. Dimana tiap tahunnya ada sebanyak 50 anak yang akan diterima dan dilakukan pemusatan dan pelatihan secara intensif. Untuk generasi keempat ini, akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2024. Dan menghafal Alquran minimal 10 juz.

“Nantinya lulusan tersebut kalau ada yang berminat dan berpretasi bisa lanjut ke Perguruan Tinggi Ilmu



RAFI'/MEDIA KALTIM

**Kabag Kesra Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza**

Quran (untuk wanita dan pria) dan di Institut Ilmu Quran (wanita) di Jakarta,” lanjutnya.

Sementara yang tidak berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Pemkab Kukar akan memfasilitasi lulusan untuk mengikuti seleksi Bai-

tul Quran Idaman (BQI). Yakni membuka rumah Quran, nantinya akan mendapat kompensasi gaji sebesar Rp 1 juta tiap bulan.

Selanjutnya, dari 3 generasi yang sudah dijalankan oleh Pemkab Kukar, ada sekitar 20 orang yang menjadi lulusan program 1 Desa 1 Hafidz. Dimana tersebar di 18 kecamatan di Kukar. Yakni gabungan dengan program Dai Masuk Desa.

Dari pemetaan lulusan yang ada, memang tidak dipungkiri masih kekurangan di daerah hulu Kukar. Seperti di Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut dan Tabang. Maka dari itu, Pemkab Kukar membuat strategis khusus, bagi peserta yang berasal dari daerah hulu Kukar akan dimintai surat pernyataan siap mengabdikan dan ditempatkan di daerah tersebut.

“Alhamdulillah (dikatakan sukses), jadi setiap safari subuh pak bupati itu yang jadi imamnya 1 Desa 1 Hafidz, kemudian yang jadi penceramahnya Dai Masuk Desa,” tutup Dendy. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

ASTRA

EZ Deal  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG  
Jl. Singen Alam No. 2266, Bontang Baru, Bontang, Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000  
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



## DPRD Kaltim Optimis 10 Raperda Prioritas Bakal Rampung Tahun ini

**SAMARINDA** - DPRD Kaltim berkomitmen untuk menyelesaikan 10 Raperda yang menjadi prioritas tahun ini. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, mengatakan bahwa target tersebut bisa tercapai sebelum tahun berakhir.

Menurut Rusman, awalnya ada 11 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2023, namun satu di antaranya ditunda pembahasannya karena data yang belum lengkap. Raperda tersebut akan dibahas kembali tahun depan. "Jadi sekarang tinggal 10 Raperda yang harus diselesaikan

tahun ini. Kami yakin bisa menyelesaikan semua," kata Rusman, Selasa (31/10/2023).

Rusman menjelaskan, saat ini ada 3 Raperda yang masih dalam proses pembahasan oleh Pansus. Ia berharap Pansus bisa bekerja cepat dan profesional untuk menuntaskan tugasnya. "Pansus sudah berjanji dengan kami untuk menyelesaikan pembahasan 3 Raperda tersebut. Kami optimis mereka bisa melakukannya," ujarnya.

Rusman menambahkan, keyakinannya didasarkan pada laporan

yang diterimanya dari Pansus. Ia mengatakan, sebagian besar Pansus sudah mencapai tahap akhir atau finalisasi pembahasan. Tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri.

"Kami harap Kemendagri juga bisa mempercepat proses evaluasi. Pembahasan Raperda ini kami targetkan sampai pertengahan November. Jadi kami optimis bisa rampung sebelum pergantian tahun," pungkasnya. **(Adv/dprdkaltim)**

*Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari*

## DPRD Dorong Serapan Anggaran OPD Dipercepat, Segera Selesaikan Pembayaran kepada Kontraktor

**SAMARINDA** - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim agar mempercepat penyerapan anggaran. Perihal ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji.

Seno Aji, mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

"Kami akan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Sebelum reses dua minggu lalu, kami sudah rapat koordinasi dengan pimpinan OPD. Kami minta mereka segera menyelesaikan pembayaran ke kontraktor," kata Seno Aji, Senin (31/10/2023).

Seno Aji menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk mengawasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Ia berharap tidak ada lagi OPD yang



menunda-nunda pembayaran ke kontraktor.

"Kami tidak mau ada OPD yang menunggak pembayaran ke kontraktor. Ini kan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Kami juga tidak mau ada anggaran yang menjadi Silpa karena tidak terserap," ujarnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharap Seno juga melakukan percepatan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah rampung pekerjaannya, agar tak

menumpuk di penghujung tahun. Hal ini agar anggaran tiap OPD terserap lebih cepat dan tidak lagi mendapat rapor merah.

"Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat," tandasnya. **(eky/adv/dprdkaltim)**

*Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari*



## Perusahaan Harus Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal



Anggota Komisi II DPRD Berau,  
Dedy Okto Nooryanto

**TANJUNG REDEB** - Banyaknya perusahaan yang bergerak di berbagai sektor di Kabupaten Berau diharapkan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal. Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto membeberkan bahwa ada perusahaan di Bumi Batiwakkal yang justru malah menyerap pekerja luar daerah, bahkan tenaga kerja asing.

"Padahal saya yakin, SDM Berau memiliki potensi dan berhak mendapatkan pelatihan serta pengembangan diri. Ini agar para pekerja itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan," katanya.

Diketahui, jumlah tenaga kerja asing yang diserap oleh perusahaan yang

ada di Berau mencapai 46 orang. "Saya sangat mengharapkan kesadaran pihak perusahaan untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal," tegasnya.

"Ini juga sebagai wujud kontribusi dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Berau," tambahnya.

Untuk itu, Politikus NasDem ini menegaskan, akan terus mendorong tenaga kerja lokal lebih diprioritaskan guna pemberdayaan masyarakat di Bumi Batiwakkal. "Di samping itu, tenaga kerja lokal juga menjadi tanggung jawab kita bersama serta memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk kemajuan," tandasnya. (adv/dez)

## Pagelaran Berau EXPO, Jangan Rugikan Masyarakat

**TANJUNG REDEB** - Harga sewa stan Berau EXPO tahun 2023 yang relatif tinggi menjadi sorotan Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Ditegaskannya, jangan sampai pelaku UMKM lokal diberatkan.

Dia mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana sekisar Rp 3 miliar untuk pameran dagang tersebut. Meski, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak ketiga.

"Karena ini merupakan rangkaian hari jadi Berau dan Tanjung Redeb, harusnya menjadi pesta rakyat. Jangan malah merugikan masyarakat," tegasnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadi pelaku praktik pungutan liar (Pungli).

"Padahal semua sudah diakomodir dengan APBD Berau, tidak sepatutnya masyarakat dibebankan biaya sewa lagi. Saya rasa dengan anggaran Rp 3 miliar itu cukup untuk mengakomodir semua tenda," katanya.

Kendati demikian, Madri Pani meminta agar pihak penyelenggara tidak membuat para pelaku UMKM lokal merasa keberatan dengan beban biaya sewa stan yang diberlakukan.

"Ini pestanya masyarakat jangan sampai malah merugikan masyarakat," tegasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

## Isu PHK Massal Sektor Pertambangan, Pemerintah Harus Bersiap



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

**TANJUNG REDEB** - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menyoroti adanya isu mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Diketahui, dalam isu yang beredar, jika PHK secara besar-besaran itu terjadi, ada 30 ribu karyawan dari sektor pertambangan akan kehilangan pekerjaan.

Peri mengungkapkan, isu tersebut merupakan isu global yang merupakan dampak dari wacana transisi energi. Namun untuk mencegah anjloknya ekonomi akibat PHK yang digadang-gadang terjadi, dirinya meminta agar Pemkab Berau mulai menyiapkan diri.

"Maksudnya adalah menyiapkan sektor pengganti. Saya rasa yang berpotensi adalah industri dan pertanian," ungkapnya.

Dirinya menyebut, saat ini Pemkab Berau masih mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan, yang seharusnya dapat dimaksimal-

kan untuk kesejahteraan Kabupaten Berau jangka panjang.

"Untuk menghadapi isu PHK massal ini, pemerintah harus mempersiapkan pilihan ke depannya. Apalagi kita memiliki beberapa sektor potensial yang bisa dikembangkan untuk menopang perekonomian," ujarnya.

Politikus Gerindra ini menilai, Pemkab Berau dapat memanfaatkan DBH Pertambangan untuk mengembangkan sektor industri dan pertanian. Sehingga beberapa tahun ke depan akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka di dua sektor tersebut.

"Potensi dua sektor itu sangat luar biasa, jika suatu saat sektor pertambangan anjlok dan terjadi PHK besar-besaran, kedua sektor ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Saya harap pemerintah bisa melihat peluang ini dengan lebih terbuka," pungkasnya. (adv/dez)

## Dorong Peningkatan Jembatan Sei Satta Segera Selesai

**TANJUNG REDEB** - Peningkatan infrastruktur penunjang terus digencarkan. Salah satunya seperti Jembatan Sei Satta yang ada di Jalan Poros Tanjung Batu.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong agar peningkatan jembatan tersebut dapat segera selesai. Meski ditargetkan rampung pada Desember mendatang. "Semoga akhir tahun ini selesai dikerjakan, karena pengerjaan jembatan sudah terprogram dalam beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, perbaikan Jembatan Sei Satta sudah terprogram pada lima tahun yang lalu. Hanya saja, pada tahun ini benar-benar didorong untuk segera diselesaikan.

"Kurang lebih 5 tahun lalu ya. Karena memang, diutamakan jalan-jalan alternatif untuk memperpendek jalur kita, jika mau menuju ke pariwisata di Tanjung Batu," terangnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, tidak hanya penyelesaian Jembatan Sei Satta, namun akses jalan yang lainnya pun terus digencarkan guna mempermudah perjalanan menuju tempat pariwisata yang ada di Bumi Batiwakkal.

"Alhamdulillah tahun ini bisa selesai. Nanti kita coba jalan ke kampung, akses-akses pariwisata ini bisa segera terselesaikan," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

## Agar Perda Berjalan Maksimal, Dorong Adanya Perbup

**TANJUNG REDEB** - Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman mendorong pemerintah untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) dari seluruh Peraturan Daerah (Perda) yang ada.

Dia mengungkapkan, dengan tidak adanya aturan turunan berupa Perbup, banyak Perda yang tidak berjalan dengan maksimal. "Apalagi di dalam Perda tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait masalah teknis yang harus diterapkan di lapangan," ungkapnya.

Rahman meminta Pemkab Berau dapat segera menyusun Perbup, tujuannya agar Perda yang ada dapat berjalan maksimal.

"Kita semua menginginkan semua perda yang ada bisa dilaksanakan maksimal di lapangan," katanya.

Dia menerangkan, beberapa waktu lalu ada empat Raperda yang disahkan menjadi Perda. Seperti Perda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan serta Perda Pengumpulan Uang dan/atau Barang.

"Juga Perda Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Semua perda itu diharapkan segera diterapkan di lapangan," bebarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, penyusunan Perbup didukung oleh SDM yang memadai. Karena itu, tenaga ahli dan profesional perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perangkat pendukung itu.

"Pastinya memerlukan tenaga ahli dan berkualitas dalam mengelola perda yang ada secara profesional, tangguh, gesit, dan cekatan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Perda dapat tercapai dan dirasakan," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman

## Kepala Kampung Terpilih Harus Miliki Inovasi



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

**TANJUNG REDEB** – Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serentak di Kabupaten Berau resmi berakhir pada 24 Oktober lalu. Saat ini telah terpilih kepala kampung yang baru di 53 kampung.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah berharap, terpilihnya kepala kampung yang baru dapat melahirkan kepala kampung yang memiliki inovasi untuk memajukan kampung dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

"Mudah-mudahan juga dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Pun terus belajar menyesuaikan sistem pemerintahan kampung mulai dari alurnya mengambil kebijakan, kemudian bagaimana profesional untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat kampung.

"Termasuk memiliki inovasi baru untuk kemajuan masyarakat kampung masing-masing," ungkapnya.

Terlebih harus mampu bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau sebagai instansi teknis yang menangani. Pun harus bisa mensejahterakanarganya.

Utamanya kepala kampung yang baru terpilih tahun ini. Berbeda dengan kepala kampung incumbent atau yang telah memegang suatu jabatan pasti memiliki pengalaman dalam birokrasi dan menjalankan tugasnya. Paling tidak, kata Dia, ada orientasi awal juga yang diberikan dari DPMK Berau bagi mereka.

"Sehingga harapan saya punya inovasi yang baik untuk kemajuan kampung dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (adv/dez)



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Foto bersama usai peraihan 7 penghargaan Multy Award oleh Unmul.

## Pemkab PPU Raih 7 Penghargaan Multy Award 2023 dari Unmul

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) raih 7 penghargaan Multy Award 2023 yang dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman (Unmul). Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi para organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melayani masyarakat.

Penghargaan itu diberikan beberapa waktu lalu dalam rangkaian Dies Natalis ke-61 Unmul megusung tema kompetisi antar daerah yang dikaitkan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta dengan daerah-daerah penyangga. Ajang Multy Award ini melibatkan 10 kabupaten/kota di Kaltim, khususnya yang berkaitan terhadap keberhasilan pembangunan daerah, dan inovasi pelayanan publik.

Setkab PPU Tohar dalam apel mengungkapkan apresiasinya atas raihan tersebut. Khususnya kepada para perwakilan yang telah mengikuti program dan inovasi dalam ajang tersebut.

"Selamat kepada para peraih penghargaan multy award yang mewakili Pemkab PPU dengan sejumlah program dan inovasi yang menjadi penilaian multy award 2023 oleh Unmul," ucapnya.

Ia meminta kepada para pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab PPU untuk terus bersinergi dan memberikan daya dukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang dimiliki. Karena untuk mensukseskan program pemerintah daerah dan pengembangan inovasi pelayanan publik dibutuhkan kerja bersama (team work).

"Pencapaian dalam penghargaan multy award ini kiranya menjadi motivasi untuk kita semua, untuk terus memberikan kontribusi positif dalam daya dukung pemerintah daerah diberbagai pembangunan yang ada termasuk juga pada pengembangan inovasi-inovasi pelayanan publik yang ada," jelas Tohar.

Adapun penghargaan dalam multy award 2023 ini meliputi 2 Piala Cumlaude Award untuk Kategori 1 Pertumbuhan Ekonomi, Success strategy Development (Strategi pembangunan melalui pinjaman daerah) oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 2. Pelayanan Pendidikan, Bersama Mencetak Juara oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

Lalu 1 Piala Magna Cumlaude

Awards untuk kategori Excellent Region in A Leading On Economic (parameter ekonomi), 1 Piala Summa Cumlaude Award untuk nilai tertinggi dari seluruh kabupaten dan kota se Kalimantan timur di semua kategori (Pembangunan Ekonomi, Pelayanan Publik dan Performa Politik). Serta 3 sertifikat untuk inovasi Kategori Pemberdayaan ekonomi lokal, Trans Ketan Jusi, Transformasi Kelompok Tani Menuju Korporasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pelayanan Kesehatan, Posmalhut (Posko Malaria Hutan), UPT Puskesmas Sotek dan Kategori Pemerataan Ekonomi, UPT PU Kecamatan, Penajam Membangun Daerah Untuk Infrastruktur mudah dan murah, oleh Dinas PU Kabupaten PPU.

"Perhargaan multy award 2023 yang diraih merupakan tolok ukur atas apa yang telah dilakukan, dan ini bukan kita pribadi yang menilainya, tetapi orang diluar pemerintah yaitu jajaran akademisi Unmul dalam multy award yang dilaksanakan pertama kalinya bersama Kabupaten/Kota di Kaltim," pungkasnya. (ADV/SBK)

# Pemkab PPU Siap Bersinergi Persiapan Kunjungan Presiden Jokowi dan Groundbreaking Bandara IKN

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memastikan kesiapannya dalam mendukung Rencana Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Dalam hal ini memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam menyukseskan kegiatan orang nomor 1 RI tersebut.

Sekcab PPU Tohar, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan yang perlu dilakukan. Rapat tersebut bertempat di Ruang Auditorium Balai Kota Balikpapan Lantai 3 Kantor Walikota Balikpapan, Senin (30/10/2023).

Rakor ini digelar untuk memantapkan sampai sejauh mana kesiapan terhadap penyambutan kedatangan Presiden Jokowi. Adapun agenda dalam kunjungan lanjutan ini akan meletakkan batu pertama atau "Groundbreaking" pembangunan bandara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemkab PPU dalam hal ini siap bersinergi dalam melakukan persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke Sepaku," ucapnya, Selasa (31/10/2023).

Peletakan batu ini akan digelar pada 1 November 2023 mendatang. Sejauh ini, kesiapan tim dalam mempersiapkan Kunker Presiden pihak EO dari masing-masing Groundbreaking telah menyampaikan hal-hal penting. "Sudah disiapkan di masing-masing titik yang nantinya akan dilakukan peletakan batu pertama," sebut Tohar.

Diketahui selain melaksanakan groundbreaking Ban-



DISKOMINFO PPU FOR MEDIKALTIMGROUP

**Rakor persiapan kunjungan tersebut digelar di Ruang Auditorium Balai Kota Balikpapan Lantai 3 Kantor Walikota Balikpapan, Senin (30/10/2023).**

dara VVIP IKN yang utama, juga akan dilakukan oleh Presiden Jokowi yaitu peletakkan batu pertama beberapa proyek lainnya. Di antaranya Pakuwon Nusantara, GB Rumah Sakit Hermina KIPP, GB Hotel, GB JIS (Jakarta Intercultural School), GB Bank Indonesia (BI), GB Rumah Sakit Mayapada, GB BPJS Ketenagakerjaan, GB PLN dan GB Ashar Orang Utan. "Selain melakukan groundbreaking, Presiden Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan IKN," pungkasnya. (ADV/SBK)

# Hadiri Rakor Penjabat, Makmur Siap Simplifikasi Aturan Daerah

PPU - Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyatakan siap untuk menyimplifikasi ada regulasi di daerah. Hal ini sebagai upaya dan komitmen untuk mewujudkan iklim aturan yang sehat di lingkungan Pemkab PPU.

Ia menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan Penjabat (Pj) yang berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Senin, (30/10/23). Acara ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Mendagri mengajak para Pj kepala daerah seluruh Indonesia untuk memangkas tumpang tindih kebijakan di daerah masing-masing," ujar Makmur.

Dijelaskan, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, setiap Pj kepala daerah juga diminta untuk



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIKALTIMGROUP

**Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat (Pj) Kementerian Dalam Negeri.**

melakukan simplifikasi proses bisnis.

Rakor ini juga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Serta memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien.

"Acara ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tutup Makmur. (ADV/SBK)

# Wadah Komunikasi dan Koordinasi, Pemkab PPU Gelar Forum Satu Data

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten PPU di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (31/10/2023). Forum ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi semua pihak terkait, dalam penyelenggaraan tata kelola data pembangunan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Khairil Anwar, Kepala BPS PPU Hotbel Purba, dan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Herlambang mewakili Pj Bupati PPU.

Ia menyampaikan bahwa pemer-

intah pusat secara nasional telah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan data secara nasional.

Bertujuan pula untuk mendukung percepatan penyediaan data yang terpadu, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Herlambang menyebut kebijakan ini wajib diimplementasikan di PPU sebagai mitra Ibukota Nusantara (IKN).

“Saat ini semua mata dan perhatian publik nasional bahkan internasional tertuju ke kabupaten kita ini. Keberadaan data dan informasi terkait daerah kita ini menjadi krusial dan sangat dibutuhkan oleh banyak

pihak,” ucapnya.

Dalam forum ini, disosialisasikan pula rencana adanya aplikasi kamus SDI-PPU yang dirancang oleh BPS PPU. Guna memudahkan perangkat daerah dalam memahami istilah-istilah terkait SDI.

Selain itu, melalui forum ini, diluncurkan pula Portal Satu Data Kabupaten PPU yang disaksikan oleh peserta Forum Satu Data. Portal Satu Data Kabupaten PPU dapat diakses melalui [data.penajamkab.go.id](http://data.penajamkab.go.id).

“Agar semua aspek terkait pelaksanaan pembangunan harus berbasis bukti, berdasar data yang akurat dan faktual,” tutup Herlambang. (ADV/SBK)





ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Peluncuran Portal Satu Data PPU, Selasa (31/10/2023).

## Pemkab PPU Launching Portal Satu Data untuk Wujudkan SDI

PPU-Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan perwujudan Satu Data Indonesia (SDI). Salah satu langkahnya ialah dengan melaunching Portal Satu Data Kabupaten PPU, Selasa (31/10/2023).

Pemkab PPU juga telah menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten PPU di aula lantai III Kantor Bupati PPU. Forum ini bertujuan juga sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi semua pihak terkait, dalam penyelenggaraan tata kelola data pembangunan untuk mewujudkan SDI.

Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Ade Rianto Embongbulan menyampaikan bahwa Forum Satu Data PPU sejak berlakunya kebijakan SDI 2019 telah melakukan beberapa hal. Mulai dari aspek regulasi, pelaksanaan perencanaan dan pengisian data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyebaran data.

Dari aspek regulasi, Pemkab PPU telah menerbitkan Perbup 37/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor 050.13/217/2022 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan perencanaan dan pengisian daftar data, pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 1.302 data statistik dan 10 Informasi Geospasial Tematik dalam daftar data prioritas daerah, yang didasarkan pada kebutuhan data pembangunan seperti RPJMD, SDGs, Evaluasi Pembangunan, dan lainnya.

"Hal ini meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 741 daftar data dan tahun 2021 sebesar 671 daftar data. Begitu pula dengan tingkat ketercapaian keterisiannya, kenaikan presentase tingkat keterisian mencapai angka 77,6 persen," ungkapnya.

Untuk peningkatan kualitas SDM, pada tahun 2023 ini, dilakukan upaya

sosialisasi dan edukasi metadata kepada administrator data di perangkat daerah serta dilakukan pula pembinaan data statistik di 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku.

"Dalam penyebaran data, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU telah membangun Portal Data Daerah melalui aplikasi Portal Satu Data Indonesia. Diharapkan portal ini dapat digunakan dalam pengisian data pada tahun 2024," ucap Ade.

Dalam forum ini, disosialisasikan pula rencana adanya aplikasi kamus SDI-PPU yang dirancang oleh BPS PPU guna memudahkan perangkat daerah dalam memahami istilah-istilah terkait SDI. Selain itu, melalui forum ini, diluncurkan pula Portal Satu Data Kabupaten PPU yang disaksikan oleh peserta Forum Satu Data. Portal Satu Data Kabupaten PPU dapat diakses melalui data.penajamkab.go.id. (ADV/SBK)



## Sukses Terapkan Upaya Efisiensi Energi, Badak LNG Raih Penghargaan Subroto 2023 Subsektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

**BONTANG** – Badak LNG terus menunjukkan komitmennya untuk keberlanjutan dan efisiensi dalam industri energi dengan menerima penghargaan bergengsi Subroto 2023 Subsektor EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) Kategori Manajemen Energi di Bangunan Gedung dan Industri. Penghargaan ini diterima langsung oleh Corporate Secretary Badak LNG Henry Trisnadewi bertempat di Ballroom Renaissance Bali Nusa Dua Resort. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat Badak LNG dalam menjalankan manajemen energi yang baik, efisien, serta ramah lingkungan.

Dalam upayanya untuk mencapai pengelolaan energi yang optimal, Badak LNG telah menerapkan Badak LNG Energy Management System (BEST) yang telah tersertifikasi

ISO 50001:2018. Penerapan BEST secara konsisten telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan yakni efisiensi energi sebesar 8.366.566 GJ, efisiensi air sebesar 2.477.740 m<sup>3</sup>, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 403.743 ton CO<sub>2</sub>eq, dan program 3R (reduce, reuse, recycle) yang berhasil mengurangi limbah B3 sebesar 79 ton dan non B3 sebanyak 258 ton. Selain itu, Badak LNG juga berkomitmen dalam pelestarian flora dan fauna serta habitatnya yang menjadi bukti manajemen energi yang baik dapat menghasilkan dampak positif yang nyata.

Adapun hasil penerapan BEST juga terlihat pada hasil benchmarking dalam sektor industri pengolahan LNG dengan Badak LNG menduduki peringkat top 25% dalam hal intensitas

konsumsi energi di tingkat nasional, peringkat 2 dari 8 perusahaan se-Asia Pasifik, dan peringkat 3 dari 16 perusahaan di level internasional. Selain itu, Badak LNG tetap berfokus pada inovasi yang dapat mengurangi penggunaan energi serta menekan emisi karbon seperti inovasi LPBS (LPG Production Booster System) dan otomatisasi sistem pengendalian antisurge kompresor refrijerasi. LPBS berhasil mengurangi konsumsi energi sebesar 1.307.167 GJ dan emisi sebesar 1.988 ton CO<sub>2</sub>eq. Inovasi otomatisasi sistem pengendalian antisurge kompresor refrijerasi berdampak pada performa kompresor yang semakin optimum sehingga dapat menekan penggunaan fuel gas sebesar 4.899 kNm<sup>3</sup>/tahun dan mengurangi emisi sebesar 11.132 ton CO<sub>2</sub>eq/tahun.

Pemanfaatan energi baru terbarukan di Badak LNG juga telah menjadi bagian dari strategi Perusahaan dengan pemasangan PLTS di beberapa bangunan kantor dan kompleks Perusahaan. Upaya ini telah berhasil menekan emisi sebesar 1.245 ton CO2.

Atas capaian ini, Henny Trisnadewi Corporate Secretary Badak LNG mengungkapkan rasa bangga dan juga menyampaikan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi energi ke depannya.

“Kami sangat bangga dengan penghargaan ini karena mencerminkan komitmen dan dedikasi Badak LNG dalam menjalankan manajemen energi yang baik dan berkelanjutan. Kami akan terus berusaha untuk menjalankan praktik berkelanjutan dan juga berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan,” ungkap Henny.

Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bagi para pemangku kepentingan yang telah berhasil melaksanakan program efisiensi energi, konservasi energi, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sukses Terapkan Budaya K3 di Lingkungan Kerja, Badak LNG Raih Penghargaan Concerned Company dalam WISCA 2023

Bontang – Badak LNG sebagai anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina tidak henti-hentinya dianugerahi penghargaan atas usaha yang konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja. Kali ini, Badak LNG meraih penghargaan dari WSO Indonesia International sebagai Concerned Company/Corporation Award dalam ajang WSO Indonesia Asian Symposium & Safety Culture Award (WISCA) 2023 pada Rabu, 18 Oktober 2023 di Yudistira Grand Ballroom, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Senior Manager SHE&Q Department Badak LNG, Pandu Wijaya Perwira. Penghargaan ini diberikan atas tingginya komitmen Badak LNG dalam mengimplementasikan budaya dan menerapkan aspek K3 di

lingkungan kerja dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan.

World Safety Organization (WSO) merupakan non governmental organization (NGO) internasional yang berdiri pada tahun 1975 dan bergabung dalam United Nation Economic & Social Council (ECOSOC) sejak 1987. Selain berkantor pusat di Amerika Serikat, WSO juga memiliki kantor perwakilan di 21 negara di seluruh dunia.

World Concerned Safety Culture Company Award (WISCA) merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan budaya K3 dengan sangat baik serta menyeluruh dan konsisten sehingga dapat memberikan value bagi perusahaan dan dunia, yang diselenggarakan setiap tahunnya baik di dalam maupun di luar negeri oleh WSO Indonesia dan WSO Internasional.

Keberhasilan Badak LNG dalam mempertahankan tingkat keselamatan kerja yang tinggi selama lebih dari 16 tahun bukan hanya sebuah pencapaian angka, tetapi juga cerminan dari budaya Perusahaan yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasionalnya. Untuk itu, dalam kesempatan yang sama Badak LNG didaulat sebagai salah satu pembicara dalam Talk Show Safety Culture yang disampaikan oleh Senior Manager SHE&Q Department Badak LNG, Pandu Wijaya Perwira.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kuatnya budaya keselamatan di Badak LNG ialah komitmen manajemen yang nyata. Ditambah dengan dukungan pekerja dan mitra kerja dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan Perusahaan. Budaya peduli keselamatan dan keamanan dalam bekerja telah menjadi bagian dalam melaksanakan pekerjaan, dimana masing-masing individu selain memperhatikan keselamatan dan keamanan diri sendiri juga mengingatkan rekan kerjanya.

Menurut Pandu, pencapaian ini merupakan buah hasil kerja keras seluruh pekerja dalam membangun budaya keselamatan. “Pencapaian ini merupakan bukti atas komitmen Perusahaan untuk menjaga setiap pekerja agar selamat di tempat kerja. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan kami akan terus menjaga standar tertinggi ini dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja,” ungkap Pandu.

Dalam proses penerapan budaya K3, Badak LNG pun menerapkan komunikasi terbuka dan transparan terkait isu-isu keselamatan. Hal ini mendorong pekerja untuk lebih berani melaporkan bahaya potensial dan insiden kecelakaan tanpa menimbulkan kekhawatiran (No Blame Policy). Tidak hanya itu, penerapan pemberian penghargaan (reward) dan pengakuan kepada pekerja juga terbukti efektif menciptakan motivasi untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi. (ADV)



# Program Inovasi Wolbachia Berjalan, Masyarakat Diminta Tetap Terapkan PHBS Cegah DBD

**BONTANG** – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang melalui Puskesmas Bontang Utara II meminta agar masyarakat tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan 3 M untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD). Walaupun saat ini sudah ada program baru, yaitu inovasi wolbachia.

Hal itu diungkapkan Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Bontang Utara II, Yulisda beberapa waktu lalu. Dikatakan Yulisda, saat ini Bon-

tang menjadi salahsatu pilot project program inovasi wolbachia, dari 5 kota yang terpilih se-Indonesia. Inovasi wolbachia merupakan program terbaru pemerintah Indonesia untuk menuntaskan DBD.

Peluncuran Nyamuk Wolbachia sudah berlangsung September lalu di Bontang. Saat ini sudah memasuki tahap service pertama. Karena setiap 2 minggu sekali nyamuk wolbachia akan menetas dan harus ada pergantian pallet.

“Walaupun inovasi wolbachia ini adalah program baru namun masyarakat harus tetap laksanakan PHBS. Karena kita belum bisa mengetahui apakah program baru ini berhasil atau tidak,” ujarnya.

Lantaran program wolbachia ini masih membutuhkan waktu lama, maka masyarakat tetap diminta menerapkan PHBS dan 3M, sebagai langkah pencegahan DBD yang selama ini sudah digaungkan. (al/adv)



## Banyak Manfaat Kesehatan Datang ke Posbindu

**BONTANG** – Masyarakat Bontang khususnya warga di Loktuan dan Guntung, yang masuk dalam wilayah Puskesmas Bontang Utara II diminta untuk rutin memperhatikan perkembangan kesehatannya dengan datang ke Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

Hal itu diungkapkan Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Bontang Utara II, Yulisda saat diwawancara redaksi.

Yulisda menjelaskan, banyak manfaat bisa didapatkan dengan rutin datang ke posbindu. Salahsatu yang utama adalah dapat mengontrol perkembangan kesehatan diri

sendiri.

Di Posbindu sendiri dapat menerima pasien dengan rata-rata usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas. Dikatakan Yulisda, dengan mendatangi posbindu, seseorang akan mendapatkan semacam Medical Check Up (MCU) dasar atau biasa disebut screening. “Dengan screening ini bisa diketahui gejala penyakit yang akan muncul di dalam tubuh. Sehingga orang itu dapat mencegahnya sejak awal,” ujarnya.

Permasalahannya adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi posbindu. Sehingga pihaknya harus memutar otak agar

masyarakat bisa datang.

“Dulu yang datang ke posbindu bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Sekarang kami lakukan jemput bola dengan mendatangi RT-RT. Sekarang sudah lumayan peningkatan jumlah pasiennya,” bebarnya.

Namun begitu, pihaknya tetap meminta kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan posbindu ini dengan maksimal, karena kesehatan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Dengan terus mengontrol perkembangan kesehatan, maka seseorang dapat mencegah sejak dini penyakit yang akan bersarang di tubuh. (al/adv)



## Ikuti Job Fair Bontang 2023, Pupuk Kaltim Buka Kesempatan Magang

BONTANG - Dorong terbukanya pasar kerja secara terbuka dan transparan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) fasilitasi sekaligus mendukung penuh terselenggaranya Job Fair Bontang 2023, sebagai jembatan bagi para pencari kerja sesuai kebutuhan perusahaan, instansi maupun lembaga yang ada di Kota Bontang.

SVP SDM Pupuk Kaltim Ardi Harto Mulyo, mengatakan Job Fair tahun ini merupakan sarana efektif untuk menjangkau potensi sumberdaya andal di tingkat lokal Bontang, untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di berbagai bidang. Termasuk peluang pengembangan kapasitas dan kompetensi masyarakat, agar makin mampu bersaing dengan daerah luar.

Hal ini menjadi salah satu fokus Pupuk Kaltim dengan turut membuka kesempatan pemagangan bagi warga Bontang melalui Job Fair 2023, untuk disiapkan sebagai SDM andal dan berkompeten sesuai kebutuhan dunia industri.

“Nantinya, para peserta akan dilatih dan ditempatkan di berbagai unit kerja perusahaan, guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas bidang ilmu yang dimiliki,” ujar Ardi, saat pembukaan Job Fair Bontang di Gedung Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, Selasa (24/10/2023).

Dijelaskan Ardi, Pupuk Kaltim terus berupaya meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam mendorong peningkatan daya saing SDM lokal, agar mampu berkompetisi dan bersaing secara nyata di pasar kerja. Menurut dia, SDM lokal memiliki kualifikasi dan kemampuan yang tidak kalah dengan daerah luar, sehingga patut didukung agar putra daerah mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang.

Hal ini pun ditindaklanjuti Pupuk Kaltim dengan memberikan kesempatan warga Bontang magang terbuka di unit kerja perusahaan, agar keterampilan yang dimiliki makin terasah serta siap untuk bersaing sesuai kebutuhan dunia industri.

“Pupuk Kaltim berharap Job Fair Bontang 2023 dapat menjadi jembatan bagi putra-putri lokal Bontang mendapatkan kesempatan bersaing di pasar kerja, sehingga masyarakat mandiri dan sejahtera secara perlahan mampu diwujudkan,” tambah Ardi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Abdu Safa Muha, menyampaikan Job Fair 2023 diikuti oleh 30 perusahaan di Kota Bontang, untuk membuka kesempatan langsung bagi warga lokal mencari peluang kerja secara fair dan transparan.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan membuka program pengembangan kapasitas masyarakat melalui pemagangan, sertifikasi dan pelatihan seperti halnya Pupuk Kaltim, guna mendorong terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang andal di berbagai bidang.

“Gagasan utamanya, Job Fair ini tidak hanya sekadar menjembatani peluang kerja, tapi juga program pelatihan dan pengembangan kap-

asitas SDM oleh perusahaan, untuk disiapkan sebagai tenaga terampil sesuai kebutuhan pasar kerja," tutur Abdu Safa Muha.

Menurut Safa Muha, hal ini ditujukan agar seluruh perusahaan maupun lembaga di Kota Bontang memiliki semangat yang sama dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat, sehingga kedepan SDM lokal makin mampu bersaing untuk mendapatkan peluang yang sama di pasar kerja.

Langkah ini juga upaya menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Bontang, dimana masyarakat dengan kapasitas dan kemampuan yang teruji akan memiliki kesempatan lebih luas untuk terserap di dunia industri.

"Itu tujuannya, agar saat ada rekrutmen terbuka SDM Bontang mampu bersaing secara sehat untuk mendapatkan kesempatan, didukung kompetensi dan kapasitas mumpuni dari hasil pemagangan maupun sertifikasi yang diikutinya," lanjut Safa Muha.

Wakil Wali Kota Bontang Najirah, mengaku sangat mendukung terselenggaranya Job Fair 2023 untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan secara terbuka. Dirinya pun mengapresiasi dukungan Pupuk Kaltim yang turut mensukseskan kegiatan, dengan membuka akses serta kesempatan bagi warga lokal untuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program pemagangan.



Dirinya menilai hal ini bentuk komitmen Perusahaan terhadap program Pemkot Bontang terkait penguatan kapasitas masyarakat, sehingga kedepan kemandirian mampu terwujud seiring makin terserapnya SDM lokal di pasar kerja dan industri.

"Terlebih di masa sekarang, sumberdaya manusia terampil, memiliki kompetensi dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi menjadi faktor penting mendapatkan peluang kerja. Sehingga adanya program pemagangan maupun pelatihan yang digelar, bisa mendorong kualitas SDM Bontang lebih berdaya saing," ungkap Najirah.

Najirah menilai, keterlibatan perusahaan memberikan bekal kompe-

tensi juga bentuk kesiapan daerah menciptakan sumberdaya terampil, agar tidak hanya menjadi penonton di tiap kesempatan yang terbuka. Sehingga adanya Job Fair 2023, diharapkan semakin menguatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha, untuk saling dukung dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai bakat, minat serta keterampilan yang dibutuhkan.

"Kita harus bergegas merubah diri untuk menjadi tenaga kerja andal dan mandiri. Untuk itu Pemerintah bersama dengan dunia usaha memfasilitasi hal tersebut melalui Job Fair ini, agar kedepannya masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas di dunia kerja," pungkash Najirah. (ADV)





Proses pemusnahan oleh Direktorat Resnarkoba Polda Kaltim dari dua orang tersangka pada Selasa (31/10/2023).

## Ditresnarkoba Polda Kaltim Musnahkan 81,967 Gram Sabu

**BALIKPAPAN**-Polda Kaltim melalui Direktorat Resnarkoba menggelar pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan pada Senin (23/10/2023) lalu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP Nyoman Wijana mengatakan, yang berhasil diungkap seberat 93,367 gram. Namun yang dimusnahkan pada kesempatan kali ini di Ruang Rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 81,967 gram.

"Sisanya kita sisihkan sebagai barang bukti di pengadilan nanti,"

ujarnya Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut Nyoman Wijana menjelaskan, barang bukti sabu ini pengungkapan dari dua tersangka berinisial SS (37) dengan barang bukti sebanyak 20,287 gram sabu, dan tersangka SK (40) sebanyak 73,08 gram.

"Barang bukti dari kedua tersangka ini juga sudah dilakukan uji lab oleh BPOM Samarinda seberat gram dan positif sabu," jelasnya.

Seluruh barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara bersama-sama diblender dan dilarutkan ke dalam air. Yang kemudian dibuang

ke dalam saluran kamar mandi dan disaksikan langsung oleh para tersangka.

"Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan uji BPOM Samarinda maka tersangka SS dan SK mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tutupnya.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Bawaslu bersama tim gabungan melakukan penurunan baliho partai politik.

## Bawaslu Bontang Mulai Tertibkan Baliho Partai sebelum Pengumuman DCT

**BONTANG** – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang telah melakukan penertiban baliho bagi Partai Politik (Parpol) yang telah dimulai Selasa (31/10/2023) hingga (3/11/2023). Penertiban dilakukan sebelum KPU Bontang menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 4 November mendatang.

Anggota Bawaslu Bontang, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ismail Usman menjelaskan Bawaslu Bontang mulai melakukan penertiban baliho Parpol yang masih terpasang di jalan-jalan umum dan tempat umum. Ini dilakukan sebelum pengumuman DCT oleh KPU.

“Ini mulai dilakukan penertiban. Penertiban sampai dengan tanggal

3 November,” kata Ismail saat dikonfirmasi Mediakaltim.com, Selasa (31/10/2023).

Ia menambahkan bahwa penertiban baliho dilakukan di semua titik di tiga kecamatan di Kota Bontang. Pengawasan dan penertibannya pun dilakukan oleh jajaran Bawaslu Bontang dan tim gabungan.

“Ada 3 tim yang diturunkan untuk disebar di 3 kecamatan. Yang terlibat seluruh jajaran Bawaslu kota, Panwascam, PKD, TNI/Polri, Dishub Bontang, dan Satpol PP,” jelas Ismail.

Ia sendiri mengatakan telah mengimbau kepada partai politik untuk menurunkan dan membersihkan secara mandiri sejak seminggu lalu dengan memberikan surat imbauan kepada Parpol. Namun hingga kini

masih ada baliho partai yang terpasang.

“Dari minggu lalu diimbau untuk dilakukan penurunan secara mandiri. Karena masih ada yang belum makanya kami yang tertibkan perhari ini hingga penetapan DCT,” ungkapnya.

Bawaslu sendiri akan menertibkan baliho hingga sebelum penetapan DCT dari KPU. “Enggak ada masanya. Yang jelas sampai tanggal 3 November harus bersih. Karena sudah penetapan DCT. Kami juga sudah layangkan surat imbauan,” tambahnya.

*Penulis: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari*



## Seorang Pengedar Diringkus Polresta Samarinda, Kantongi 4 Poket Sabu dan Uang Rp 450 Ribu Hasil Jualan Sabu

SAMARINDA - Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan P. Suryanata Kelurahan Bukit pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda menjelaskan kronologis kejadian yaitu, pada hari Jum'at (27/10/2023), diterima laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Bukit pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

Kemudian, anggota Satresnarkoba

Polresta Samarinda melakukan observasi dengan cermat, dan sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan pengeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang berinisial M(36) yang pada saat itu sedang berhenti. Si M(36) menggunakan 1 unit kendaraan R2 merk Suzuki Shogun warna hitam seorang diri. Di dalam kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah klip plastik yang berisikan 2 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,41 gram bruto yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan pelaku.

Kemudian ditemukan kembali 1 buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,46 gram bruto, 1 buah sendok

penakar yang terbungkus 1 buah klip plastic ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Pelaku, Uang tunai yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 450 ribu ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanannya.

Selanjutnya pelaku M(36) beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



# MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



## KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama  
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan  
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy  
**THAT'S ALL**.COM